



**MODUL PLPG
PENDIDIKAN EKONOMI**

**BAB V
MATERI EKONOMI**

**Penyusun:
Tim Pendidikan Ekonomi Unesa**

**KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU
2013**



PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Lakukanlah orientasi terdahulu dengan membaca sekilas dari awal sampai akhir.
2. Cermati dengan seksama tujuan, prasyarat, dan cara penggunaan untuk membekali arah yang akan dituju dalam mempelajari bab ini.
3. Bacalah secara cermat keseluruhan materi yang terdapat dalam bab ini
4. Silahkan menguji diri melalui mengerjakan pelatihan dengan cara menjawab pertanyaan yang ada pada pelatihan.
5. Berdiskusilah dengan teman lain tentang isi bab ini untuk memperdalam kemampuan Anda.



Kegiatan Pembelajaran 1

Permasalahan Ekonomi

1. Lembar Informasi

1.1. Kebutuhan

Kebutuhan merupakan perwujudan keinginan yang timbul dalam diri manusia yang menuntut adanya pemenuhan. Kebutuhan manusia timbul karena tiga hal. Pertama, organ manusia membutuhkan kalori untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik disebut kebutuhan biologis. Kedua, kebutuhan manusia akan kehidupan yang lebih baik menurut standart tertentu disebut kebutuhan sosial. Dan ketiga, kegiatan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan lain-lain disebut kebutuhan intelektual.

Pada dasarnya kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan keinginan yang dimiliki setiap individu juga berbeda. Selain itu, kebutuhan seorang individu senantiasa berkembang sepanjang waktu baik secara jumlah, kuantitas maupun jenisnya.

Pada dasarnya kebutuhan manusia dibedakan menjadi:

a. Menurut intensitasnya, dibedakan atas:

- 1). Kebutuhan primer
- 2). Kebutuhan sekunder
- 3). Kebutuhan tersier

Kebutuhan menurut intensitas untuk setiap individu berbeda-beda. Sebagai contoh, kebutuhan seorang mahasiswa dan sopir angkot. Buku kuliah merupakan kebutuhan primer bagi mahasiswa. Akan tetapi, tidak bagi seorang sopir angkot.

b. Menurut sifatnya, dibedakan atas:

- 1). Kebutuhan jasmani
- 2). Kebutuhan rohani

c. Menurut tujuannya, dibedakan atas:

- 1). Kebutuhan masyarakat atau publik
- 2). Kebutuhan individual

d. Menurut waktunya, dibedakan atas:

- 1). Kebutuhan masa kini
- 2). Kebutuhan akan datang/masa depan

Benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut alat pemuas kebutuhan. Ada dua macam alat pemuas kebutuhan yaitu barang dan jasa. Barang dan jasa dihasilkan dari kombinasi sumber daya.



Barang adalah suatu objek yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Umumnya barang berwujud benda. Buku yang Anda baca sekarang, pensil yang Anda gunakan untuk menulis, kacamata yang Anda kenakan, bahkan sarapan pagi Anda juga merupakan contoh barang. Lain halnya dengan jasa. Jasa adalah objek yang tidak berwujud yaitu tidak dapat dilihat dan diraba, namun dapat dirasakan. Konser Peterpan, layanan internet, kuliah pagi merupakan contoh jasa.

Barang menurut cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah suatu barang yang keberadaannya terbatas sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan. Dengan demikian untuk memperolehnya dibutuhkan suatu pengorbanan, maka harganya lebih dari nol. Sedangkan barang bebas adalah suatu barang yang keberadaannya melebihi kebutuhan sehingga harganya nol.

Kadangkala kita salah menduga tentang suatu barang bebas. Contoh: udara dan air sungai. Sekilas nampak bebas, namun ketika kita membutuhkan udara yang bersih dan air sungai bersih terkadang kita harus membayar lebih. Harga tersebut muncul akibat adanya kelangkaan. Dalam kondisi tersebut udara dan air sungai termasuk dalam kategori barang ekonomi.

Menurut penggunaannya, suatu barang dapat berfungsi sebagai barang pengganti atau barang pelengkap. Suatu barang dikatakan berfungsi sebagai barang pengganti atau barang substitusi jika barang tersebut dapat menggantikan fungsi barang lain, contoh beras dan gandum. Sedangkan barang pelengkap merupakan barang yang dapat digunakan secara bersama-sama guna melengkapi fungsi barang lain, contoh gula dan kopi.

Ditinjau dari proses pembuatannya, barang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Contoh, kapas, benang, kain. Dalam hal ini kapas berfungsi sebagai barang mentah yang akan diolah menjadi benang. Sedangkan benang adalah barang setengah jadi, karena benang tersebut akan diolah menjadi kain. Dan kain adalah barang akhir yaitu barang yang dapat langsung dikonsumsi. Namun ketika kain diolah menjadi baju maka kain termasuk barang setengah jadi. Sedangkan baju adalah barang jadi. Dengan demikian dalam menentukan kedudukan barang dalam proses produksi dapat dilihat dari bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan.

1.2. Kelangkaan

Apakah Anda menginginkan sebuah rumah yang mewah, mobil baru, bahkan makanan yang lezat setiap hari?. Meskipun semua keinginan tersebut telah Anda penuhi, pasti akan muncul keinginan-keinginan yang lain. *Pada umumnya keinginan manusia adalah tidak terbatas, sedangkan sumberdaya yang*



digunakan sebagai alat pemuas keinginan tersebut terbatas adanya. Kondisi inilah yang pada akhirnya menimbulkan masalah kelangkaan. Banyak para ekonom yang berpendapat bahwa permasalahan utama dalam ilmu ekonomi adalah mengatasi kelangkaan, yaitu bagaimana manusia menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi keinginannya yang tidak terbatas. Kelangkaan akan terjadi apabila jumlah yang diinginkan melebihi jumlah yang tersedia pada harga sebesar nol, sehingga menuntut manusia untuk melakukan pilihan.(Mc, Eachern, 2001: 2-3).

Keinginan manusia adalah tidak terbatas. Hal inilah yang menyebabkan kebutuhan manusia menjadi beragam adanya. Dalam hal ini ketika sebuah keinginan tersebut menuntut adanya pemenuhan, maka ia akan menjadi sebuah kebutuhan. Contoh, ketika kita lapar maka kita ingin makan. Dalam kasus ini, ketika keinginan makan tersebut menuntut adanya pemenuhan maka menjadi kebutuhan untuk makan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan adanya alat pemuas kebutuhan, yaitu barang dan jasa.

Barang dan jasa yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan dihasilkan dari sumber daya atau faktor produksi. Akibat keterbatasan sumberdaya maka barang dan jasa yang tersedia juga terbatas, atau akibat sumberdaya langka maka barang dan jasa juga langka. Barang dan jasa dikatakan langka jika jumlah yang diinginkan melebihi jumlah yang tersedia.

Kelangkaan berbeda dengan kekurangan barang dan jasa. Perhatikan ilustrasi berikut ini:

Ilustrasi 1:

Seorang guru menggunakan keilmuan yang ia miliki dan sumberdaya lain yang langka seperti kemampuan mengajar, waktu dan tenaganya dalam mengajar untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang diperoleh tersebut ditukarkan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan ribuan barang dan jasa lainnya untuk memenuhi keinginan guru tersebut.

Ilustrasi 2:

Hujan deras yang mengguyur beberapa kota di pulau Jawa selama dua hari telah menimbulkan musibah banjir dan berdampak pada lumpuhnya jalur transportasi antar kota. Akibatnya distribusi bahan pangan, khususnya komoditas beras ke berbagai kota, khususnya Surabaya terhenti. Situasi ini mengakibatkan jumlah persediaan beras di Kota Surabaya menipis dan beras pun sulit dijumpai di pasar.

Ilustrasi pertama merupakan contoh kasus kelangkaan. Kasus yang dialami oleh guru tersebut mencerminkan kelangkaan. Sumber daya yang dimiliki oleh guru, seperti keilmuan, kemampuan mengajar, waktu dan tenaga adalah terbatas, sedangkan keinginan yang dimiliki guru tersebut tidak terbatas, maka munculah masalah kelangkaan. Permasalahan kelangkaan tersebut dapat diatasi dengan membuat pilihan. Pembuatan pilihan dalam



kondisi yang serba langka mengharuskan guru tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh barang dan jasa tertentu.

Adapun ilustrasi yang kedua bukan merupakan kelangkaan melainkan kekurangan barang dan jasa dalam hal ini kekurangan beras. Akibat terputusnya jalur transportasi, distribusi beras ke Kota Surabaya terhambat sehingga jumlah persediaan beras pun menipis. Dalam hal ini masyarakat di Kota Surabaya mengalami kekurangan beras bukan kelangkaan beras.

Dengan demikian perbedaan utama antara kelangkaan dan kekurangan terletak pada ada tidaknya keputusan untuk membuat pilihan. Barang dan jasa langka karena sumber daya langka. Keterbatasan sumber daya berakibat tidak semua keinginan dapat terpenuhi, maka kita harus membuat pilihan dan setiap pilihan yang kita ambil mengandung biaya peluang, yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh barang dan jasa tertentu. Inilah yang disebut dengan kelangkaan. Sementara dalam kasus kekurangan tidak menuntut adanya keputusan untuk membuat pilihan. Kekurangan jumlah barang dan jasa akan berdampak pada naiknya harga barang tersebut. Adapun implikasi perilaku atas kekurangan tersebut adalah mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi.

1.3. Tiga Masalah Pokok Ekonomi

Seiring berkembangnya peradaban manusia, kebutuhan manusia pun semakin beragam dari sebelumnya dan semakin kompleks pula permasalahan ekonomi yang kompleksitas masalah ekonomi yang dihadapi di masa lampau dan masa kini berbeda. Kendatipun demikian, setiap masalah ekonomi bermula dari "alokasi sumber-sumber yang langka diantara sekian banyak kemungkinan penggunaan yang berbeda-beda, sehingga dapat dicapai kepuasan yang maksimal".

Secara umum setiap bentuk sistem perekonomian harus dapat memecahkan tiga permasalahan pokok ekonomi yang mendasar yaitu:

a. **Apa (*what*), barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan berapa banyaknya?**

Barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian adalah sangat banyak jenisnya. Masalah pertama yang muncul adalah keterbatasan sumberdaya untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Oleh sebab itu pilihan-pilihan mutlak untuk dilakukan. Dengan demikian masyarakat harus menentukan kebutuhan manakah yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan manakah yang harus ditunda.



b. **Bagaimana (how), Bagaimana sumber daya ekonomi harus digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut?**

Barang dan jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya. Contoh, dalam bidang pertanian. Peningkatan kapasitas produksi pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara, misal dengan pendekatan intensifikasi atau ekstensifikasi. Dari kedua pilihan tersebut, manakah yang akan dipilih?. Apapun pilihannya, tentunya pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan hasil yang diperoleh, yaitu pilihan yang mampu memberikan hasil terbaik atau dengan kata lain akan dipilih cara yang paling efisien. Dengan demikian masalah efisiensi dijadikan dasar pemilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam kegiatan produksi.

c. **Untuk siapa (for whom, Bagi Siapa barang dan jasa tersebut diproduksi?**

Masalah selanjutnya adalah ditujukan kepada siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Kepada masyarakat tentunya. Kendatipun ditujukan kepada masyarakat, namun tidak semudah yang kita pikirkan. Pada dasarnya, inti permasalahan yang ketiga berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa yang dihasilkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

1.4. Biaya Peluang

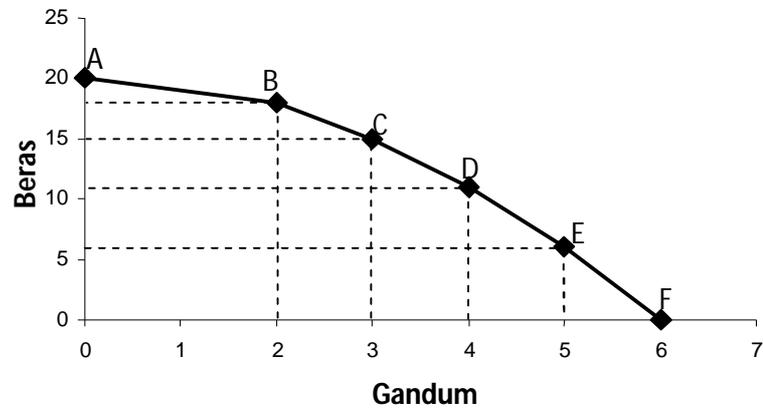
Sebagaimana kita ketahui, kebutuhan setiap individu beragam. Oleh karenanya alat pemuas kebutuhan yang harus disediakan beragam pula. Di lain pihak, kemampuan setiap sistem perekonomian dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dibatasi oleh adanya keterbatasan sumber daya. Akibatnya tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, sehingga setiap pelaku ekonomi harus memilih dan setiap pilihan mengandung biaya peluang atau *opportunity cost*.

Biaya peluang atau *Opportunity cost* dari suatu pilihan adalah nilai alternatif terbaik yang hilang atau biaya yang dikeluarkan akibat hilangnya kesempatan lain. Konsep *opportunity cost* dapat digambarkan melalui kurva PPF (*production possibility frontier*) atau kurva batas kemungkinan produksi.

Perhatikan kurva batas kemungkinan produksi pada gambar 1. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa perekonomian menghasilkan 2 jenis barang, yaitu beras dan gandum. Oleh karenanya kurva tersebut menunjukkan *trade off* antara beras dan gandum. Pada poin D, perekonomian menghasilkan 10 ton beras dan 4 ton gandum. Sedangkan pada poin C, perekonomian menghasilkan 15 ton beras dan 3 ton gandum. Misal, posisi awal komoditas yang dihasilkan suatu perekonomian adalah pada poin C, dan perekonomian memutuskan



untuk menambah kapasitas gandum dari 3 ton menjadi 4 ton. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah *opportunity cost* keputusan tersebut?



Gambar 5.1 Kurva *Production Possibility Frontier*

Dalam hal ini, ketika perekonomian memutuskan untuk mengubah komposisi barang yang dihasilkan dari poin C ke poin D, maka terjadi pengalihan penggunaan sumberdaya. Guna memproduksi lebih banyak gandum dari 3 ton menjadi 4 ton, maka perekonomian harus mengurangi kapasitas produksi beras sebanyak 5 ton. Dengan demikian komposisinya menjadi 10 ton beras dan 4 ton gandum. Hilangnya kesempatan untuk memproduksi 5 ton beras merupakan *opportunity cost* dari memproduksi tambahan 1 ton gandum.

1.5. Sistem Ekonomi

Kegiatan ekonomi suatu negara berjalan melalui sebuah sistem yang disebut dengan sistem ekonomi. Sistem diartikan sebagai seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Adapun ciri-ciri sebuah sistem antara lain:

- a. Mempunyai tujuan,
- b. Mempunyai batas-batas walaupun mungkin terbuka untuk berinteraksi dengan lingkungan,
- c. Terdiri dari sub-sistem atau unsure/komponen system yang saling berhibungan dan saling berpengaruh dan saling tergantung dalam satu kesatuan system,
- d. Sistem selalu berproses mentransformasikan atau mengubah input menjadi output system,
- e. Terdapat mekanisme kontrol dalam system yang merupakan umpan balik,
- f. Adanya mekanisme kontrol yang mempunyai kemampuan mengatur diri dan menyesuaikan diri dengan perubahan/lingkungan.



Adapun sistem ekonomi adalah seperangkat komponen dalam kegiatan perekonomian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Bentuk sistem ekonomi antar negara kemungkinan tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi secara umum sistem perekonomian di dunia ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang kinerja perekonomiannya diatur oleh pasar dan tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah. Adapun ciri-cirinya antara lain:

- a. Adanya kebebasan memilih pekerjaan,
- b. Hak milik individu diakui,
- c. Tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah
- d. Keseimbangan perekonomian terbentuk melalui sistem pasar

Sistem ekonomi liberal memiliki kelemahan sebagai berikut:

- a. Pembagian pendapatan tidak adil dan merata,
- b. Tidak mendasarkan hubungan upah atas perikemanusiaan,
- c. Kurang mampu menjaga stabilitas,
- d. Kurang mampu mengendalikan alat bayar luar negeri,
- e. Dalam kenyataannya tidak ada atau jarang ada persaingan sempurna.

Sistem ekonomi komando atau terpusat sistem ekonomi yang kinerja perekonomiannya berada di bawah kendali pemerintah. Adapun ciri utamanya adalah tidak ada pengakuan atas hak milik pribadi/individu. Berikut ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi komando:

- a. Tidak adanya kebebasan memilih pekerjaan,
- b. Hak milik individu tidak diakui,
- c. Adanya campur tangan pemerintah dalam setiap kegiatan perekonomian
- d. Keseimbangan perekonomian ditentukan oleh pemerintah melalui perencanaan terpusat

Kelemahan sistem ekonomi komando antara lain:

- a. Pekerja menuntut kebebasan memilih pekerjaan yang disukainya,
- b. Perencanaan bersifat kurang fleksibel,
- c. Bila perencanaan dijalankan ada kemungkinan kurang sempurna di lapangan,
- d. Untuk mencapai kesempurnaan, akhirnya perencanaan menjadi mahal

Akibat adanya kelemahan-kelemahan dalam kedua sistem ekonomi tersebut di atas, mendorong banyak negara terutama negara sedang berkembang untuk mengembangkan sistem ekonomi campuran. Dalam Sistem ekonomi campuran terdapat adanya:

- a. Peran negara yang lebih aktif,
- b. Peran swasta lebih luas dalam kegiatan ekonomi,



- c. Peran perencanaan yang lebih luwes,
- d. Pengaturan yang lebih luas terhadap kehidupan ekonomi, dalam hal ini negara/pemerintah dapat membuat peraturan untuk mempertinggi efisiensi, menjalankan sendiri kegiatan ekonomi, dan menjalankan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi.

2. Lembar Pelatihan

- 1) Jelaskan mengapa kebutuhan setiap individu berbeda-beda!
- 2) Identifikasikanlah kebutuhan profesi seorang petani dan guru menurut intensitasnya!
- 3) Pada kondisi yang bagaimanakah suatu komoditas dikatakan langka?
- 4) Perhatikan ilustrasi berikut ini:
Hujan mengguyur kota Jakarta selama 3 hari berturut-turut. Akibat sistem drainase yang buruk, banjir melanda Kota Jakarta. Warga masyarakat banyak yang terjangkit penyakit kulit akibat langkanya air bersih.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, identifikasikanlah faktor penyebab langkanya air bersih!
- 5) Setiap pilihan memiliki biaya peluang. Jelaskan makna pernyataan tersebut beserta contohnya!
- 6) Linda adalah lulusan SMU yang diterima di Universitas Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Linda juga telah diterima untuk bekerja penuh waktu di toko. Identifikasikanlah biaya oportunitasnya jika Linda memutuskan untuk kuliah dan bukan bekerja!
- 7) Jelaskan perbedaan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando!
- 8) Identifikasikanlah kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran!



Kegiatan Pembelajaran 2

Pelaku Ekonomi dalam Perekonomian

1. Lembar Informasi

Kegiatan pelaku ekonomi dalam perekonomian mencakup kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi. Dalam ilmu ekonomi, produksi didefinisikan sebagai kegiatan atau proses untuk menciptakan nilai atau memperbesar daya guna suatu barang.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan produksi memerlukan sumberdaya yang lazim dikenal dengan sebutan faktor produksi. Adapun faktor produksi terdiri atas:

a. Alam, atau sumber daya alam (*natural resources*)

Sumberdaya alam atau faktor produksi alam meliputi segala sesuatu yang berasal atau disediakan oleh alam, bukan berasal dari kegiatan manusia dan dapat digunakan untuk kegiatan produksi. Sebagai contoh: tanah, air, pohon, binatang, minyak bumi, gas alam dan lain-lain

b. Tenaga kerja manusia, atau sumber daya manusia (*human resources*)

Tenaga kerja merupakan usaha manusia yang mencakup fisik dan mental atau merupakan peranan manusia dalam proses produksi. Tenaga kerja dibedakan atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.

Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja dengan keahlian khusus yang diperoleh melalui jenjang pendidikan khusus, seperti guru, dokter, akuntan, dan sebagainya. Sedangkan tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang memiliki pengalaman atau kecakapan untuk melakukan kerja karena terlatih. Adapun tenaga tidak terdidik dan terlatih, yaitu tenaga kerja yang melakukan aktivitas kerjanya tidak memerlukan pendidikan atau pengalaman. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan dimana hampir setiap orang mampu melakukannya.

c. Modal (*capital*)

Modal atau *capital* sering diartikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk membeli mesin produksi dan faktor produksi lainnya. Dalam pengertian ekonomi modal didefinisikan sebagai semua jenis barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan produksi barang dan jasa lain. Termasuk pula di dalamnya barang-barang modal seperti mesin-mesin, alat



pengangkutan, alat pengolahan, gedung-gedung, pabrik, dan bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi.

Menurut penggunaannya modal terbagi atas modal tetap dan modal lancar. Modal tetap merupakan modal yang dapat dipakai dalam beberapa kali proses produksi, misalnya mesin, alat produksi dan sebagainya. Sedangkan modal lancar adalah modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Misalnya, bahan baku, bahan penolong dan lain sebagainya.

Menurut asal pembentukan, modal dibedakan atas modal yang berasal dari dalam negeri dan modal yang berasal dari luar negeri. Modal yang berasal dari dalam negeri disebut penanaman modal dalam negeri (PMDN) biasanya berasal dari tabungan masyarakat. Sedangkan modal yang berasal dari luar negeri disebut penanaman modal asing (PMA) yang dapat berupa pinjaman atau grant.

d. Kecakapan tata laksana (*skill*)

Kecakapan tata laksana atau *skill* adalah keahlian untuk mengerjakan usaha-usaha ekonomi dalam arti memimpin atau mengatur organisasi perusahaan. Kecakapan tata laksana ini disebut juga entrepreneurship. Seorang *entrepreneur* berperan untuk mengatur penggunaan ketiga faktor produksi (alam, tenaga kerja, dan modal) dalam proses produksi.

Keempat faktor produksi tersebut diatas adalah unsur-unsur yang diperlukan dalam proses produksi. Atas jasanya dalam proses produksi, keempatfaktor produksi tersebut menerima balas jasa. Kepada faktor produksi alam, dibayarkan sewa (*rent*). Untuk tenaga manusia, dibayarkan upah (*wage*), gaji (*salary*), dan royalti. Untuk modal, dibayarkan bunga (*interest*). Sedangkan kepada skill dibayarkan dengan laba (*profit*) yaitu selisih antara penerimaan total dari penjualan dengan biaya total dari penggunaan sumber daya yang lain.

Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jaringan distribusi dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi langsung dan distribusi tak langsung.

Adapun kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Dalam konsep ekonomi mikro, kegiatan konsumsi diartikan sebagai kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai atau guna suatu barang dengan tujuan untuk mencapai kepuasan. Besarnya konsumsi setiap individu berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh pendapatan konsumen sebagai individu.

Dalam sistem perekonomian sederhana terdapat dua pelaku ekonomi. Kedua pelaku ekonomi tersebut adalah rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan dan memiliki pola kegiatan ekonomi tertentu.



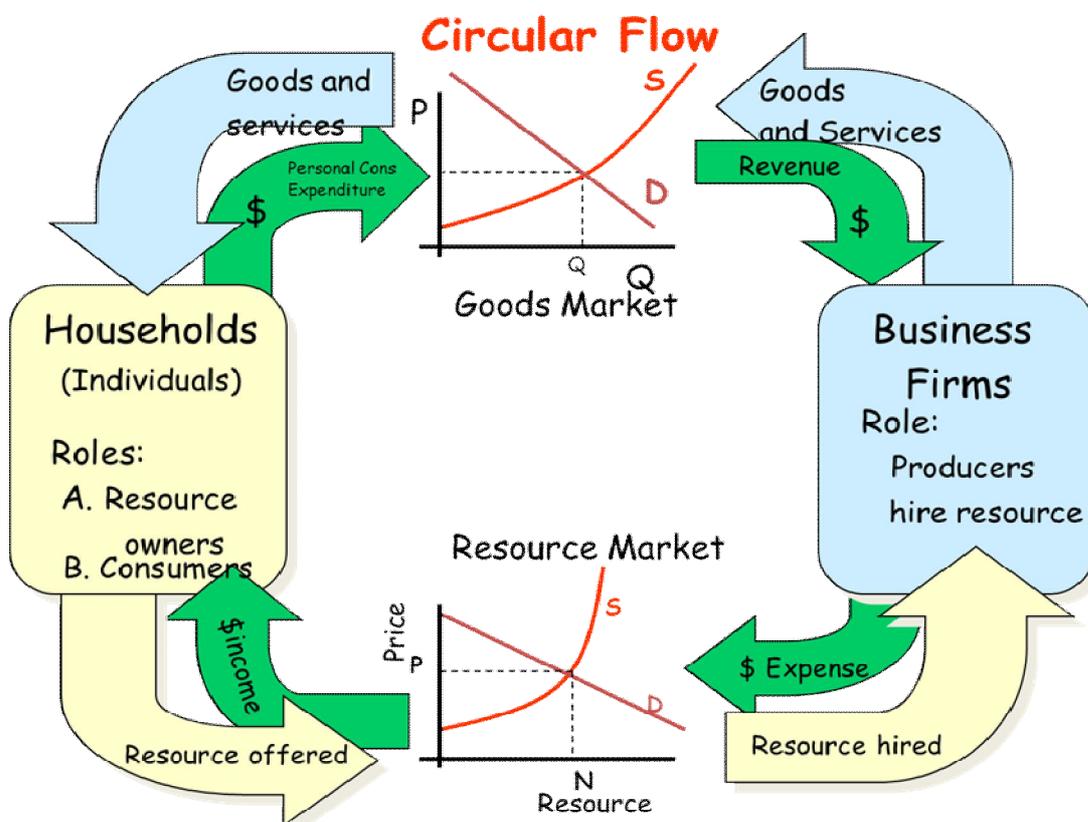
Rumah tangga keluarga dapat berupa organisasi atau perorangan yang lazim disebut konsumen. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga adalah:

- Menjual atau menyewakan sumber-sumber daya yang dimiliki sehingga mendapatkan pendapatan berupa upah/gaji, sewa, bunga, atau laba sebagai hasil penjualan atau persewaan atas sumber-sumber daya yang telah diserahkan.
- Membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa privat yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan

Rumah tangga perusahaan dalam kegiatan ekonomi berperan sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan antara lain:

- Membeli atau menyewa sumber-sumber daya dari rumah tangga keluarga dan rumah tangga pemerintah
- Menggunakan sumber-sumber daya yang telah dibeli atau disewa dari rumah tangga keluarga dan rumah untuk menghasilkan barang dan jasa
- Menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk lingkaran aliran aktivitas ekonomi (*the circular flow*) seperti pada gambar 5.2.



Gambar 5.2 Lingkaran Aliran Aktivitas Ekonomi Dua Sektor



Gambar 5.2 menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian sederhana yaitu dua sektor. Dalam hal ini rumah tangga keluarga akan menawarkan sumber daya yang mereka miliki ke rumah tangga perusahaan di pasar sumber daya atau pasar faktor produksi. Dengan demikian, pasar faktor produksi mempertemukan permintaan dan penawaran atas faktor produksi. Permintaan pada pasar sumber daya berasal dari rumah tangga perusahaan, sedangkan penawaran berasal dari rumah tangga keluarga.

Selanjutnya setiap faktor produksi tersebut oleh rumah tangga perusahaan akan diproses menjadi barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan diperjualbelikan kepada rumah tangga keluarga di pasar barang dan jasa. Berkebalikan dengan pasar faktor produksi, permintaan dalam pasar barang dan jasa bersumber dari rumah tangga keluarga, sedangkan penawaran atas barang dan jasa bersumber dari rumah tangga keluarga.

Dalam sistem perekonomian dua sektor sebagaimana terlihat dalam gambar 5.2 tersebut berjalan mengikuti mekanisme pasar, artinya keseimbangan yang terjadi merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Namun adakalanya pasar tidak selalu mencapai posisi keseimbangan, adakalanya pasar mengalami kegagalan pasar. Misal, ketika musim panen raya, pada saat panen raya harga gabah yang terbentuk di pasar terlalu rendah dan merugikan petani. Dalam rangka membantu nasib petani tersebut, diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga gabah. Masuknya pemerintah dalam sistem perekonomian tersebut berarti bertambahnya pelaku ekonomi dalam perekonomian. Sistem perekonomian pun bergeser menjadi sistem perekonomian tiga sektor.

Adapun peran rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan dalam perekonomian bertambah, yaitu membayar pajak dan memanfaatkan barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan peran pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Membeli sumber-sumber daya, barang dan jasa dari rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan
- b. Dengan sumber daya serta barang dan jasa yang dibelinya, rumah tangga pemerintah menghasilkan dan menyediakan barang dan jasa publik bagi rumah tangga perusahaan dan rumah tangga keluarga
- c. Memungut pajak dari rumah tangga keluarga dan perusahaan dengan maksud untuk membiayai pembelian barang dan jasa serta sumber daya yang diperlukan.
- d. Bertindak sebagai pengatur perekonomian, pemerintah berkewajiban:
 - ✓ Mengusahakan distribusi pendapatan nasional yang adil dan merata



- ✓ Mengusahakan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja yang tinggi
- ✓ Mengusahakan tingkat harga yang relatif stabil
- ✓ Mengusahakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang memadai



Gambar 5.3 Lingkaran Aliran Aktivitas Ekonomi Tiga Sektor

Kegiatan perekonomian dua sektor dan tiga sektor termasuk dalam kegiatan perekonomian tertutup. Hal ini dikarenakan tidak ada peran rumah tangga luar negeri. Setiap barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Namun ketika perekonomian dalam negeri tidak dapat memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, maka perlu adanya peran rumah tangga luar negeri melalui kegiatan ekspor dan impor.

Ketika perekonomian suatu negara melibatkan empat pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri maka kegiatan perekonomian tersebut merupakan perekonomian empat sektor. Rumah tangga luar negeri dapat berperan sebagai konsumen dan produsen.



2. Lembar Pelatihan

- 1) Jelaskan perbedaan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen!
- 2) Jelaskan mengapa pemerintah perlu campur tangan dalam perekonomian?
- 3) Setiap individu akan melakukan kegiatan konsumsi atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan konsumsi tersebut, pola konsumsi yang bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindakan konsumerisme?



Kegiatan Pembelajaran 3

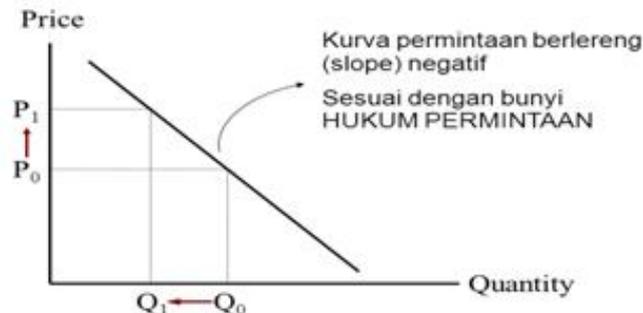
Permintaan dan Penawaran

1. Lembar Informasi

1.1. Permintaan

A. Pengertian Permintaan

Permintaan mencerminkan berbagai jumlah barang yang diminta dalam berbagai tingkat harga. Fungsi permintaan atas suatu barang adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Dalam hal ini hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta adalah negative, artinya jika harga naik maka jumlah barang yang diminta turun, dan sebaliknya. Secara matematis, fungsi permintaan adalah $Q = a - bP$. Koefisien fungsi permintaan (b) bernilai negatif, hal ini mencerminkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta sehingga sesuai dengan hukum permintaan. Penampakan kurva permintaan, dijelaskan dalam gambar 5.4:



Gambar 5.4. Kurva Permintaan

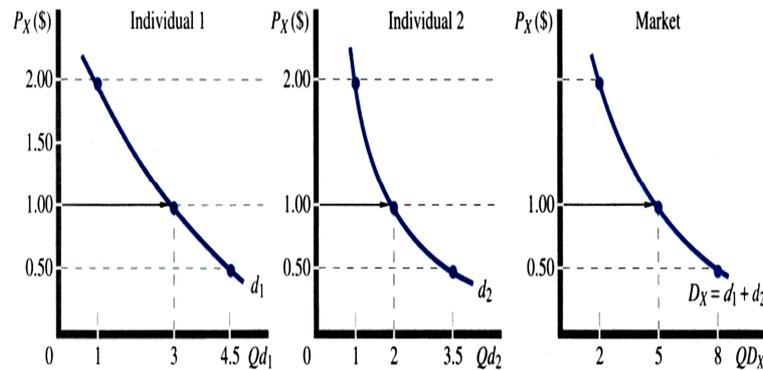
B. Hukum Permintaan

Hukum permintaan berbunyi jika harga barang turun maka jumlah barang yang diminta naik dan sebaliknya atau $P_x \text{ naik} \rightarrow Q_x \text{ turun}$. Permintaan dari segi subyek dibedakan antara permintaan individual dan permintaan pasar. Permintaan individu merupakan berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga oleh setiap individu. Sedangkan permintaan pasar merupakan penjumlahan atas permintaan individu. Adapun data permintaan individu dan permintaan pasar disajikan dalam tabel 5.1 dan gambar 5.5.



Tabel 5.1. Skedul Permintaan Individu dan Permintaan Pasar

Harga	Permintaan Individu 1	Permintaan Individu 2	Permintaan Pasar
2,00	1	1	2
1,00	3	2	5
0,50	4,5	3,5	8

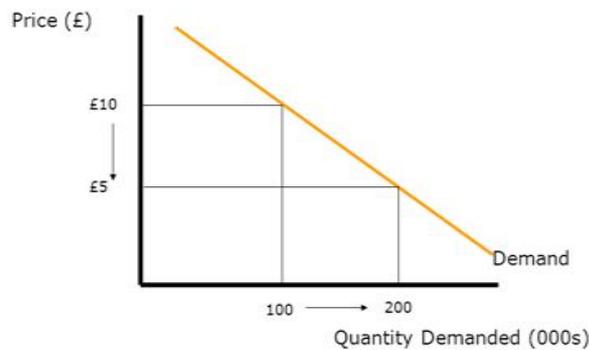


Gambar 5.5. Kurva Permintaan Individu dan Permintaan Pasar

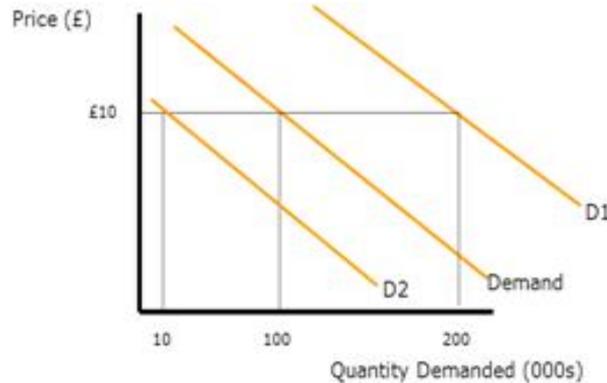
Hukum permintaan berlaku dalam asumsi *ceteris paribus*. *Ceteris paribus* adalah keadaan dimana, faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan selain harga adalah tetap. Faktor tersebut diantaranya selera, pendapatan, harga barang lain, tradisi/budaya dan ekspektasi.

C. Pergerakan Kurva Permintaan

Pergerakan kurva permintaan ada dua, yaitu permintaan yang bergerak sepanjang kurva (*a long demand curve*) dan permintaan yang bergeser ke kiri atau ke kanan (*shift demand curve*). Adapun bentuk pergerakan dan pergeseran kurva dijelaskan gambar 5.6 dan 5.7 sebagai berikut :



Gambar 5.6. Pergerakan di Sepanjang Kurva



Gambar 5.7. Pergeseran Kurva Permintaan

Permintaan yang bergerak di sepanjang kurva terjadi akibat adanya perubahan atas harga barang yang bersangkutan. Sedangkan bergesernya kurva permintaan disebabkan adanya perubahan atas faktor di luar harga barang yang bersangkutan. Dalam hal ini kurva bergeser dari D ke D1 atau D2. Bergesernya kurva permintaan tersebut disebabkan adanya perubahan di luar harga barang itu sendiri.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Permintaan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain:

- 1) Harga barang itu sendiri
Jika harga barang itu sendiri naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Kurva permintaan tidak mengalami perubahan.
- 2) Harga Barang lain yaitu barang substitusi dan barang komplementer
Jika harga barang substitusi naik, maka jumlah barang substitusi yang diminta naik dengan tingkat harga tetap, kurva permintaan bergeser ke kanan. Sebaliknya jika harga barang substitusi turun, maka jumlah barang substitusi yang diminta turun dengan tingkat harga tetap, kurva permintaan bergeser ke kiri. Lain halnya dengan barang komplementer, jika harga barang komplementer naik maka jumlah barang komplementer yang diminta turun dengan tingkat harga tetap dan kurva bergeser ke kiri. Demikian halnya jika harga barang komplementer turun, maka jumlah barang komplementer yang diminta naik dengan tingkat harga tetap dan kurva bergeser ke kanan.
- 3) Pendapatan
Jika pendapatan seseorang naik, maka jumlah barang yang diminta naik dan kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya jika pendapatan seseorang turun, maka jumlah barang yang diminta turun dan kurva permintaan bergeser ke kiri.



- 4) Selera
Permintaan seseorang berubah karena selera terhadap barang dan jasa yang ada.
- 5) Struktur usia
Karakteristik usia penduduk mempengaruhi permintaan.
- 6) Jumlah pembeli dipasar
Jika jumlah pembeli dipasar banyak memungkinkan jumlah barang yang diminta naik dan sebaliknya.
- 7) Harapan yang akan datang
Perubahan harga mendatang mempengaruhi permintaan.

E. Fungsi Permintaan

Fungsi permintaan suatu barang adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada periode tertentu. Variabel-variabel lain yang mempengaruhi permintaan antara lain, (1) harga barang yang bersangkutan, (2) pendapatan konsumen, (3) harga barang lain, (4) selera dan trend, (5) jumlah penduduk, (6) Iklan, (7) perkiraan konsumen di masa yang akan datang.

Dari ketujuh variabel tersebut, variabel harga barang yang bersangkutan merupakan variabel yang paling penting sehingga digunakan sebagai variabel bebas. Sedangkan ke-6 variabel yang lain dianggap konstan. Secara matematis penulisan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga adalah sebagai berikut:

$$Qd_x = f(P_x)$$

Secara umum, bentuk fungsi permintaan adalah sebagai berikut:

$$Qd_x = a - bP_x$$

Keterangan: Qd_x = Jumlah barang X yang diminta

P_x = Harga barang X

a dan b = Parameter

Dalam mencari fungsi permintaan, Anda dapat menggunakan dua cara yaitu:

- 1). Dengan menggunakan rumus: $Qd_x = a - bP_x$
- 2). Dengan menggunakan rumus:

$$\frac{P - P_1}{P_2 - P_1} = \frac{Q - Q_1}{Q_2 - Q_1}$$



Contoh:

Pada harga Rp 100,00 jumlah permen karet yang diminta adalah 10 bungkus. Jika harganya turun menjadi Rp 75,00 jumlah permen karet yang diminta adalah 20. Tentukan fungsi permintaannya!

Jawab:

1). Dengan menggunakan rumus: $Qd_x = a - bP_x$

Jika $P_1 = 100$; $Q_1 = 10$

$$\text{maka } Qd_x = a - bP_x \quad 10 = a - 100b$$

$P_2 = 75$; $Q_2 = 20$

$$\begin{aligned} \text{maka } Qd_x = a - bP_x \quad 20 &= a - 75b \quad - \\ -10 &= -25b \\ b &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

Jika $b = \frac{2}{5}$, maka $10 = a - 100b$

$$10 = a - 100\left(\frac{2}{5}\right)$$

$$a = 50$$

Jika $a = 50$ dan $b = \frac{2}{5}$, maka fungsi permintaan adalah $Qd_x = 50 - \frac{2}{5}P$

2). Dengan menggunakan rumus:

$$\frac{P - P_1}{P_2 - P_1} = \frac{Q - Q_1}{Q_2 - Q_1}$$

Jika $P_1 = 100$ dan $Q_1 = 10$

$P_2 = 75$ dan $Q_2 = 20$

$$\frac{P - P_1}{P_2 - P_1} = \frac{Q - Q_1}{Q_2 - Q_1} \quad \text{maka} \quad \frac{P - 100}{75 - 100} = \frac{Q - 10}{20 - 10}$$

$$\frac{P - 100}{-25} = \frac{Q - 10}{10}$$

$$10(P - 100) = -25(Q - 10)$$

$$10P - 1000 = -25Q + 250$$

$$10P = -25Q + 1250$$

$$Q = 50 - \frac{2}{5}P$$

1.2. Penawaran

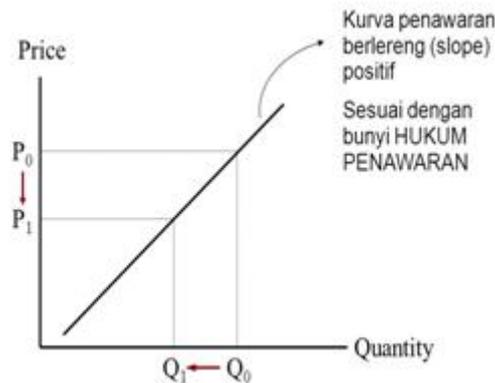
A. Pengertian Penawaran

Penawaran diartikan sebagai berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Adapun hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif, dimana jika harga



naik maka barang yang ditawarkan naik, dan jika harga turun maka barang yang ditawarkan turun. Secara matematis fungsi penawaran adalah $Q = -a + bP$.

Koefisien fungsi penawaran (b) adalah positif, hal ini sesuai dengan hukum penawaran. Berdasarkan fungsi penawaran diatas, maka penampakan kurva penawaran pada gambar 5.8. Sebagai berikut :



Gambar 5.8. Kurva Penawaran

B. Hukum Penawaran

Hukum penawaran, jika harga barang turun maka jumlah barang yang ditawarkan naik dan sebaliknya, P_x naik $\rightarrow Q_x$ naik. Penawaran dari segi subyek dibedakan antara penawaran individual dan penawaran pasar. Penawaran individu merupakan berbagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh seorang individu pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran pasar merupakan akumulasi atas penawaran setiap individu di pasar sebagaimana diilustrasikan dalam tabel 5.2.

Tabel 5.2. Skedul Penawaran Individu dan Penawaran Pasar

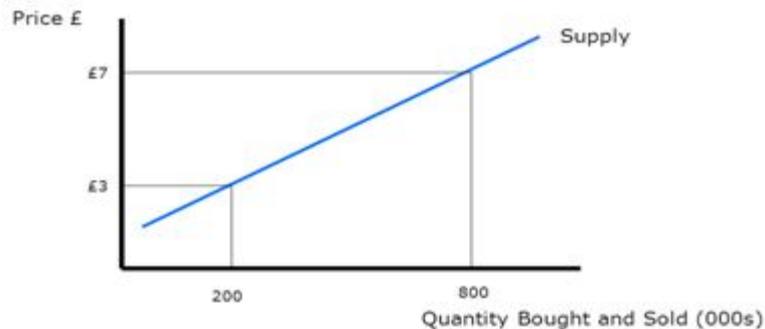
Harga	Penawaran Individu 1	Penawaran Individu 2	Penawaran Pasar
2,00	10	5	15
1,00	5	3	8
0,50	3	1	4

Berlakunya hukum penawaran, bersifat *ceteris paribus*. *Ceteris paribus* adalah keadaan dimana, faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran selain harga adalah tetap. Faktor tersebut antara lain : teknik produksi, harga barang lain, jumlah penjual dipasar, harga sumber, dan perkiraan harga yang akan datang.

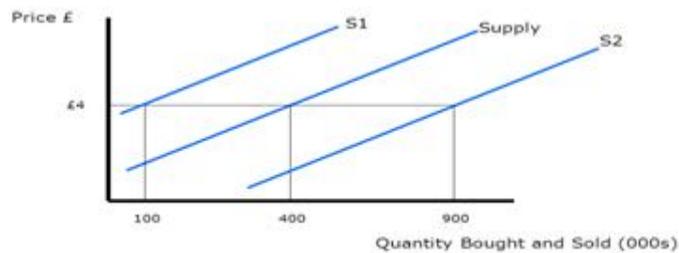


C. Pergerakan Penawaran

Pergerakan penawaran ada dua, yaitu a long supply curve dan shift supply curve. Adapun bentuk pergerakan dan pergeseran kurva dijelaskan gambar 5.9 dan 5.10, sebagai berikut :



Gambar 5.9. Pergerakan di Sepanjang Kurva



Gambar 5.10. Pergeseran Kurva

Penawaran yang bergerak di sepanjang kurva terjadi akibat adanya perubahan atas harga barang yang bersangkutan. Sedangkan bergesernya kurva penawaran disebabkan adanya perubahan atas faktor di luar harga barang yang bersangkutan. Dalam hal ini kurva bergeser dari D ke D1 atau D2. Bergesernya kurva penawaran tersebut disebabkan adanya perubahan di luar harga barang itu sendiri.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, antara lain :

- 1). Teknologi
- 2). Harga sumber produksi.
- 3). Perkiraan harga sumber dan harga barang yang akan datang
- 4). Jumlah penjual dipasar
- 5). Kebijakan pemerintah dan stabilisasi
- 6). Ekspektasi produsen di masa akan datang



E. Fungsi Penawaran

Fungsi penawaran suatu barang adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada periode tertentu. Variabel-variabel lain yang mempengaruhi penawaran antara lain, (1) harga barang yang bersangkutan, (2) keuntungan yang diperoleh dari memproduksi barang dan jasa lain, (3) tingkat teknologi, (4) biaya produksi, (5) perubahan jumlah produsen, (6) ekspektasi produsen di masa yang akan datang.

Dari keenam variabel tersebut, variabel harga barang yang bersangkutan merupakan variabel yang paling penting sehingga digunakan sebagai variabel bebas. Sedangkan ke-5 variabel yang lain dianggap konstan. Secara matematis penulisan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga adalah sebagai berikut:

$$Q_{s_x} = f(P_x)$$

Secara umum, bentuk fungsi penawaran adalah sebagai berikut:

$$Q_{s_x} = a + bP_x$$

Keterangan: Q_{s_x} = Jumlah barang X yang ditawarkan

P_x = Harga barang X

a dan b = Parameter

Dalam mencari fungsi penawaran, Anda dapat menggunakan dua cara yaitu:

- 1). Dengan menggunakan rumus: $Q_{s_x} = a + bP_x$
- 2). Dengan menggunakan rumus:

$$\frac{P - P_1}{P_2 - P_1} = \frac{Q - Q_1}{Q_2 - Q_1}$$

Contoh:

Pada harga Rp 500,00 jumlah kue yang ditawarkan adalah 60 bungkus. Jika harganya turun menjadi Rp 700,00 jumlah kue yang ditawarkan adalah 100. Tentukan fungsi penawarannya!



Jawab:

1). Dengan menggunakan rumus: $Q_{s_x} = a + bP_x$

$$\text{Jika } P_1 = 500, Q_1 = 60 \quad \text{maka } Q_{s_x} = a + bP_x \quad 60 = a + 500b$$

$$P_2 = 700, Q_2 = 100 \quad \text{maka } Q_{s_x} = a + bP_x \quad \underline{100 = a + 700b}$$

$$-40 = -200b$$

$$b = \frac{1}{5}$$

$$\text{Jika } b = \frac{1}{5}, \quad \text{maka } 60 = a + 500b$$

$$60 = a + 500\left(\frac{1}{5}\right)$$

$$a = -40$$

$$\text{Jika } a = -40 \text{ dan } b = \frac{1}{5}, \text{ fungsi penawaram adalah } \mathbf{Q_{s_x} = -40 + \frac{1}{5}P}$$

2). Dengan menggunakan rumus:

$$\frac{P - P_1}{P_2 - P_1} = \frac{Q - Q_1}{Q_2 - Q_1}$$

$$\text{Jika } P_1 = 500 \text{ dan } Q_1 = 60$$

$$P_2 = 700 \quad \text{dan } Q_2 = 100$$

$$\frac{P - P_1}{P_2 - P_1} = \frac{Q - Q_1}{Q_2 - Q_1} \quad \text{maka} \quad \frac{P - 500}{700 - 500} = \frac{Q - 60}{100 - 60}$$

$$\frac{P - 500}{200} = \frac{Q - 60}{40}$$

$$40(P - 500) = 200(Q - 60)$$

$$40P - 20000 = 200Q - 12000$$

$$40P = 200Q + 8000$$

$$Q = -40 + \frac{1}{5}P$$

2. Lembar Kerja

- 1) Peserta membaca lembar informasi dalam kegiatan belajar secara seksama
- 2) Peserta mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan secara mandiri (lembar kerja dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2)



3. Langkah Kerja

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal dalam menggunakan modul ini, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain:

- 1) Peserta membaca secara seksama uraian-uraian materi yang ada pada kegiatan belajar.
- 2) Peserta mengerjakan lembar kerja secara mandiri
- 3) Peserta secara bersama-sama mengkoreksi dan menyimpulkan jawaban atas lembar kerja
- 4) Peserta mengerjakan pelatihan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki.

4. Lembar Pelatihan

Pada setiap kasus tersebut putuskan apakah peristiwa tersebut akan memberikan akibat perubahan pada permintaan dan penawaran beras.

- 1) Akibat adanya konflik di Thailand, ribuan imigran masuk ke Indonesia
- 2) Musim kemarau panjang mengakibatkan sebagian besar lahan padi gagal panen.



Kegiatan Pembelajaran 4

Keseimbangan Pasar

1. Lembar Informasi

Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan dimana pada tingkat harga tertentu, permintaan sama dengan penawaran. Dalam persamaan $Q_d = Q_s$ atau $P_d = P_s$. Penentuan keseimbangan pasar dapat dilakukan dengan pendekatan tabel, kurva, dan matematika. Untuk memahami penentuan keseimbangan pasar dengan menggunakan pendekatan tabel perhatikan tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3. Skedul Permintaan dan Penawaran

Harga (P)	Jumlah yang diminta (Q_d)	Jumlah yang ditawarkan (Q_s)
Rp 1000	130	10
2000	90	38
3000	60	60
4000	40	80
5000	20	90

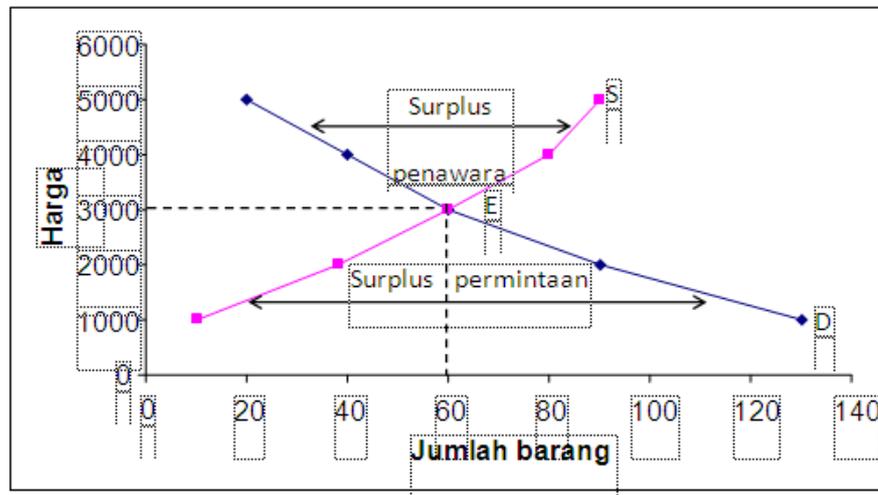
Perhatikan tabel 5.3, dengan membandingkan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan pada berbagai tingkat harga dapat ditemukan tiga keadaan di pasar. Keadaan tersebut adalah surplus permintaan, keseimbangan, dan surplus penawaran. Surplus permintaan terjadi apabila jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan atau ketika $Q_d > Q_s$. Perhatikan tabel 5.3, ketika harga Rp 1.000,00 jumlah barang yang diminta adalah 130 dan jumlah yang ditawarkan adalah 10. Akibatnya jumlah barang yang diminta (Q_d) lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan (Q_s) maka terjadi surplus permintaan, yaitu sebesar 120 ($Q_d - Q_s = 130 - 10 = 120$).

Surplus penawaran terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah barang yang diterima atau ketika $Q_s > Q_d$. Pada harga Rp 4.000,00 terjadi surplus penawaran sebesar 40 bungkus ($Q_s - Q_d = 80 - 40 = 40$). Hal yang serupa juga terjadi pada harga Rp 1.000,00.

Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta atau ketika $Q_s = Q_d$. Pada posisi keseimbangan pasar, baik pembeli dan penjual sama-sama merasa puas atas harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Harga yang diwujudkan yaitu sebesar Rp 3.000,00 dinamakan harga pasar atau harga keseimbangan.



Cara yang kedua untuk menentukan keseimbangan pasar adalah melalui penggabungan kurva permintaan dan kurva penawaran. Berdasarkan tabel 5.3 di atas maka kurva permintaan dan penawaran yang terbentuk adalah sebagai berikut:



Gambar 5.11. Kurva Keseimbangan Pasar

Keseimbangan pasar terjadi apabila kurva permintaan dan penawaran berpotongan pada satu titik. Berpotongnya kurva permintaan dan penawaran pada satu titik mencerminkan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan adalah sama. Perhatikan gambar 5.11. Kurva permintaan dan penawaran berpotongan pada titik E. Pada titik E, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan adalah sama yaitu 60 dan harga yang terbentuk adalah Rp 3.000,00. Dengan demikian harga keseimbangan adalah Rp 3.000,00 dengan jumlah barang yang diperjualbelikan sebesar 60.

Cara yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan matematika. Berdasarkan data yang ada pada tabel 5.3, terlebih dahulu dihitung fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat harga keseimbangan kedua fungsi tersebut dimasukkan ke dalam persyaratan keseimbangan pasar, yaitu $Q_d=Q_s$ atau $P_d=P_s$. Setelah harga keseimbangan diketahui, selanjutnya nilai harga keseimbangan disubstitusikan ke persamaan fungsi permintaan atau penawaran untuk menentukan tingkat jumlah keseimbangan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini:



$$\begin{array}{l} \text{Diketahui: } P_1 = 6 \quad Q_{d1} = 200 \quad Q_{d2} = 300 \\ \quad \quad \quad P_2 = 5 \quad Q_{s1} = 800 \quad Q_{s2} = 600 \end{array}$$

Fungsi Permintaan:

$$\begin{array}{l} Q_d = a + bP \\ 200 = a + 6b \\ \underline{300 = a + 5b} - \\ -100 = b \\ b = -100 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Jika } b = -100 \text{ maka } 200 = a + 6b \\ 200 = a + 6(-100) \\ 200 = a - 600 \\ a = 200 + 600 \\ a = 800 \end{array}$$

Maka fungsi permintaan $Q_d = 800 - 100P$

Fungsi Penawaran:

$$\begin{array}{l} Q_s = a + bP \\ 800 = a + 6b \\ \underline{600 = a + 5b} - \\ 200 = b \\ b = 200 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Jika } b = 200 \text{ maka } 800 = a + 6b \\ 800 = a + 6(200) \\ 800 = a + 1200 \\ a = 800 - 1200 \\ a = -400 \end{array}$$

Maka fungsi permintaan $Q_s = -400 + 200P$

Syarat Keseimbangan Pasar $Q_d = Q_s$

$$\begin{array}{l} 800 - 100P = -400 + 200P \\ -100P - 200P = -400 - 800 \\ -300P = -1200 \\ P = 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Jika } P = 4 \text{ maka } Q_d = 800 - 100P \\ = 800 - 100(4) \\ = 800 - 400 \\ = 400 \end{array}$$

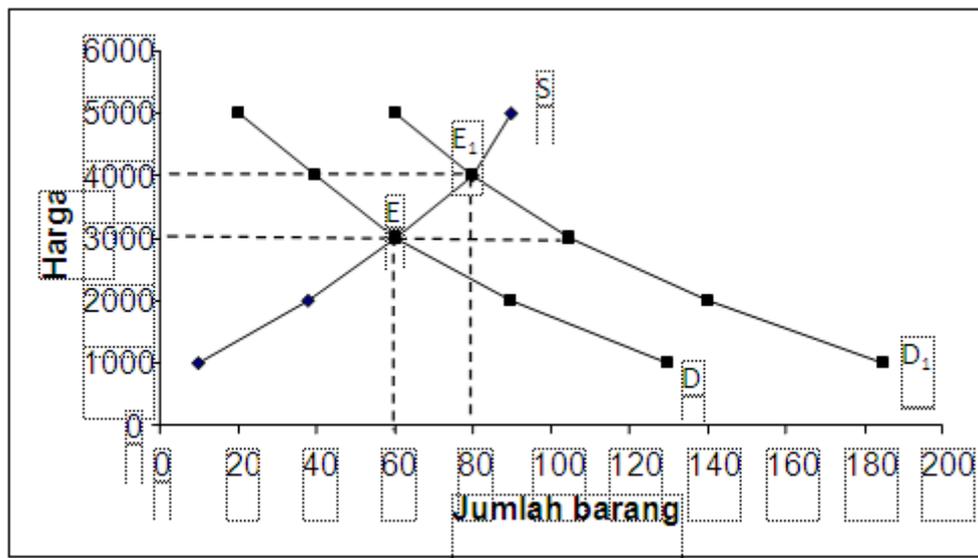
$Q_d = Q_s = 400$, maka keseimbangan pasar terbentuk pada tingkat harga $P = 4$ dan jumlah barang keseimbangan $Q_d = Q_s = 400$

Keseimbangan pasar suatu barang yang telah terbentuk dapat berubah akibat adanya perubahan pada permintaan dan/atau penawaran barang tersebut. Perubahan permintaan dan penawaran tersebut disebabkan oleh



perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran selain faktor harga barang yang bersangkutan. Ingat! Perubahan harga barang yang bersangkutan hanya berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan bukan permintaan atau penawaran.

Contoh 1: Pemerintah mengumumkan adanya kenaikan gaji pegawai negeri. Kenaikan gaji berdampak pada bertambahnya kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi nasi pecel, sehingga permintaan bertambah (diasumsikan nasi pecel adalah barang normal).



Gambar 5.12. Pergeseran Keseimbangan Pasar akibat Bertambahnya Permintaan

Perhatikan Gambar 5.12. Pada awalnya, ketika harga Rp 3.000,00 jumlah nasi pecel yang diminta adalah 60 bungkus. Akibat adanya kenaikan gaji, kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi nasi pecel pada tingkat harga yang sama (Rp 3.000,00) meningkat menjadi 80 bungkus. Kurva permintaan pun bergeser ke kanan, sedangkan kurva penawaran tetap. Akibat bertambahnya permintaan, sedangkan penawaran tetap maka keseimbangan pasar pun berubah. Harga keseimbangan naik menjadi Rp 4.000,00 dengan jumlah nasi pecel yang diperjualbelikan mencapai 80 bungkus. Titik ekuilibrium bergeser dari titik E ke E_1 .

2. Lembar Kerja

- 1) Peserta membaca lembar informasi dalam kegiatan belajar secara seksama
- 2) Peserta mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan secara mandiri (lihat lampiran 3)



- 3) Peserta secara bersama-sama mengkoreksi dan menyimpulkan jawaban atas lembar kerja

3. Langkah Kerja

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal dalam menggunakan modul ini, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain:

- 1) Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-masing kegiatan belajar.
- 2) Peserta mengerjakan lembar kerja secara mandiri
- 3) Peserta secara bersama-sama mengkoreksi dan menyimpulkan jawaban atas lembar kerja
- 4) Kerjakan pelatihan tiap standar kompetensi untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki atas materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar.

4. Lembar Pelatihan

- 1) Perhatikan ilustrasi berikut ini:
Musim kemarau panjang berdampak pada gagalnya hasil panen padi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah yang terjadi pada keseimbangan harga pasar?
- 2) Perhatikan ilustrasi berikut:
Anggaplah saat ini Anda berada pada pasar minyak mentah untuk alat pemanas ruangan. Adapun situasi yang terjadi adalah harga minyak mentah turun secara signifikan, dan musim dingin yang luar biasa menghantam negara-negara di bagian timur-utara dimana minyak adalah bahan bakar utama bagi alat pemanas ruangan.
Apakah yang akan terjadi pada keseimbangan pasar minyak untuk alat pemanas ruangan?



Kegiatan Pembelajaran 5

Pasar Barang

1. Lembar Informasi

Pasar sering diartikan sebagai sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi usaha. Dalam hal ini pasar ditunjukkan sebagai suatu tempat tertentu atau yang menyangkut proses pertukaran secara fisik sehingga terikat oleh waktu dan tempat. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, pasar diartikan sebagai suatu organisasi dimana pembeli dan penjual dapat saling berhubungan.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia dalam mengadakan transaksi tidak lagi terikat pada waktu dan tempat fisik. Melainkan mereka mulai memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk memasarkan produknya dan mengadakan transaksi. Salah satunya dengan memanfaatkan internet. Kendatipun antara pembeli dan penjual tidak lagi bertemu secara fisik, kegiatan yang mereka lakukan diartikan sebagai pasar.

Dengan demikian suatu pasar bukanlah menunjukkan pada suatu tempat tertentu atau yang menyangkut proses pertukaran secara fisik layaknya pasar yang selama ini Anda kunjungi. Melainkan adanya pasar tergantung pada ada atau tidaknya sekelompok pembeli potensial dan penjual potensial yang mengadakan transaksi tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Tegasnya setiap konsep tentang pasar harus mengandung empat unsur yaitu harga, pembeli, penjual, dan persaingan.

Pengklasifikasian pasar dapat dibedakan menurut kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Menurut wujud atau sifatnya
 - pasar konkrit, yaitu suatu organisasi dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi usaha beserta barang yang diperjualbelikan.
 - pasar abstrak, yaitu suatu organisasi dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi usaha, namun barang dan jasa yang diperjualbelikan tidak tersedia yang ada hanyalah contoh atau monsternya saja.
- b. Menurut ukuran luas secara geografis
 - pasar internasional, yaitu pasar yang melibatkan pembeli dan penjual dari seluruh penjuru dunia.
 - pasar regional, yaitu pasar yang melibatkan pembeli dan penjual dari sebuah kawasan atau regional. Contoh: kawasan negara asia tenggara.

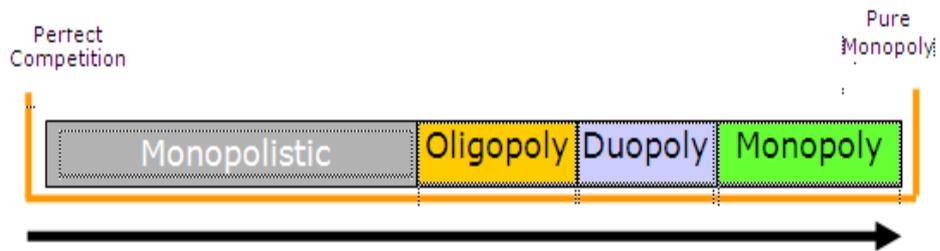


- pasar lokal, yaitu pasar yang melibatkan pembeli dan penjual yang berasal dari masyarakat setempat.
- c. Menurut jenis barang dan jasa yang diperjualbelikan
 - pasar barang dan jasa, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa.
 - pasar faktor produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi.
- d. Menurut ukuran batas negara
 - pasar dalam negeri
 - pasar luar negeri
- e. Menurut waktu
 - daily market, yaitu pasar dimana setiap terjadi penambahan permintaan di pasar dapat dipenuhi dengan mengeluarkan persediaan.
 - short run market, yaitu pasar dimana setiap terjadi penambahan permintaan di pasar dipenuhi dengan produksi baru. Namun kegiatan produksi tersebut tanpa menggunakan penambahan peralatan modal.
 - Long run market, yaitu pasar dimana setiap terjadi penambahan permintaan di pasar dipenuhi dengan produksi baru dengan menggunakan penambahan peralatan modal
- f. Menurut struktur pasar
 - Pasar persaingan sempurna
 - Pasar monopoli
 - Pasar persaingan monopolistis
 - Pasar oligopoli
 - Pasar duopoli

Pengklasifikasian pasar menurut struktur pasar pada dasarnya menunjukkan bagaimana suatu pasar terbentuk dengan berdasar pada:

- a. Banyaknya perusahaan yang terdapat dalam pasar.
- b. Jenis barang dan jasa yang diproduksi.
- c. Tingkat keketatan persaingan antar perusahaan dalam pasar.
- d. Besarnya kekuasaan perusahaan dalam mempengaruhi harga.
- e. Tingkat keuntungan yang peroleh perusahaan.
- f. Perilaku perusahaan, seperti strategi dalam menentukan harga dan persaingan di luar harga.
- g. Mudah tidaknya perusahaan baru untuk memasuki pasar.

Berdasar ketujuh kriteria tersebut di atas maka terdapat empat bentuk struktur pasar dalam perekonomian, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistis, pasar oligopoli, pasar duopoli dan pasar monopoli. Jika ditinjau dari keketatan persaingan antar perusahaan, maka keempat struktur pasar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.13. Struktur Pasar menurut Keketatan Persaingan

Berdasarkan Gambar 5.13, struktur pasar yang terdapat pada ujung kiri adalah *perfect competition* atau pasar persaingan sempurna. Sedangkan struktur pasar pada ujung kanan adalah *pure monopoly*. Pada pasar *pure monopoly* tidak terdapat persaingan, hal ini dikarenakan jumlah perusahaan hanya satu. Dengan demikian semakin ke kanan semakin besar kekuatan monopoli yang dimiliki oleh perusahaan dalam pasar sehingga semakin kecil tingkat persaingan antar perusahaan bahkan tidak ada.

A. Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna, pasar yang terorganisir dengan sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna, diantaranya :

- Terdapat banyak penjual dan pembeli dalam pasar
- Barang yang diperjualbelikan adalah homogen
- Penjual dan pembeli mengetahui keadaan pasar
- Harga merupakan datum
- Tidak ada campur tangan pemerintah
- Penjual dan pembeli bertindak sebagai price taker
- Harga ditentukan oleh kekuatan pembeli dan penjual
- Kurva permintaan berupa garis horisontal

Konsep tentang persaingan sempurna tidak realistis, maksudnya struktur pasar yang memenuhi seluruh kriteria pasar persaingan sempurna dalam prakteknya tidak pernah ada. Kendatipun demikian masih terdapat struktur pasar yang memiliki kemiripan dengan pasar persaingan sempurna. Berdasarkan karakteristik-karakteristik tersebut di atas, produk-produk pertanian merupakan contoh terbaik – kecuali jika ada kontrol harga yang dilakukan oleh pemerintah.

Contoh produk bayam. Jika anda menaikkan harga di atas harga pasar, penjualan anda akan menjadi nihil karena pembeli bayam dapat membeli produk serupa pada harga pasar dari salah satu penjual yang jumlahnya banyak. Namun jika anda menurunkan harga jual, penjualan anda tidak akan meningkat. Anda dapat menjual berapa pun jumlahnya pada harga pasar,



sehingga tidak masuk akal untuk menurunkan harga jual di bawah harga pasar.

Keuntungan dari persaingan sempurna antara lain:

- a. Ketatnya persaingan akan membantu pengalokasian sumber daya pada penggunaan yang paling efisien sehingga perusahaan dapat beroperasi pada tingkat efisiensi yang tinggi.
- b. Harga yang berlaku di pasar sama dengan biaya marginal.
- c. Pembeli mendapatkan berbagai keuntungan, diantaranya kepuasan dalam memilih barang dan harga yang kompetitif.
- d. Perusahaan dapat mencapai keuntungan normal dalam jangka panjang.

Sedangkan kelemahan pasar persaingan sempurna, antara lain:

- a. Tidak mendorong inovasi
- b. Membatasi pilihan konsumen, karena jenis barang yang dihasilkan sama.

B. Pasar monopoli

Pasar monopoli adalah bentuk organisasi pasar dimana terdapat perusahaan tunggal yang menjual barang dan tidak ada barang pengganti yang serupa. Beberapa karakteristik pasar monopoli, diantaranya :

- a. Produknya unik
- b. Hanya terdapat penjual tunggal
- c. Terdapat kendala untuk masuk bagi penjual lain
- d. Kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat
- e. Promosi semata-mata hanya untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen.
- f. Monoplis bertindak sebagai price maker

Atas karakteristik tersebut, maka pembentukan harga di pasar persaingan monopoli turun miring dari kiri atas kekanan bawah. Permintaan pada pasar monopoli bersifat in elastis, menggambarkan bahwa perubahan jumlah barang yang diminta kurang lentur terhadap perubahan harga barang.

Dewasa ini, kekuatan monopoly dapat terbentuk jika dalam suatu industri terdapat sebuah perusahaan yang mendominasi pasar, yaitu menguasai pasar lebih dari 25% yang disebut dengan **actual monopoly**. Pada dasarnya kekuatan monopoli dapat terbentuk karena:

- a. pertumbuhan yang dicapai oleh suatu perusahaan,
- b. adanya persekutuan atau merger dengan perusahaan lain,
- c. adanya perlindungan hukum yang didasarkan pada undang-undang sehingga suatu perusahaan memperoleh monopoli atas barangnya, misal hak paten dan lisensi, keadaan alam yang menjadikan suatu perusahaan memiliki monopoli. Contoh Zanzibar adalah penghasil cengkeh terbaik sehingga memegang monopoli cengkeh



Kebaikan Monopoli

- a. Memungkinkan perusahaan untuk mengkombinasikan sumber-sumber ekonomi dalam skala besar sehingga perusahaan dapat mencapai skala ekonomi atau *economic scale*.
- b. Memungkinkan penambahan yang cukup pesat dalam investasi khususnya investasi pada penelitian dan pengembangan.
- c. Mempercepat timbulnya inovasi.
- d. Memungkinkan pengembangan produk baru

Kelemahan Monopoli

- a. Kebebasan konsumen dalam memilih barang terbatas.
- b. Penetapan harga yang tinggi merugikan konsumen
- c. Berpotensi pada timbulnya inefisiensi dalam perusahaan sebagai akibat tidak adanya persaingan

C. Pasar oligopoli

Struktur pasar dengan dua atau lebih oligopolis. Jika oligopolis bekerja sama disebut kartel. Beberapa karakteristik pasar persaingan oligopoli, diantaranya :

- a. Ada beberapa oligopolis yang menguasai pasar
- b. Menghasilkan barang standar ataupun barang berbeda corak
- c. Kekuatan menentukan harga
- d. Adanya usaha promosi dengan iklan

Atas karakteristik tersebut, maka pembentukan harga di pasar oligopoli turun miring dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan pada oligopoli menunjukkan adanya pangsa pasar berbeda pada garis harga yang sama, terjadi persaingan ketat antara oligopolis, dan bersifat in elastis.

D. Pasar Persaingan monopolistis

Suatu struktur pasar yang mengandung unsur persaingan dan monopoli. Karakteristik pada pasar persaingan monopolistik diantaranya adalah :

- a. Sejumlah perusahaan dengan menjual produk substitut dekat
- b. Permintaan yang bercirikan khusus
- c. Slop permintaan negatif elastis
- d. Masing masing firm bertindak sebagai price maker

Pasar persaingan monopolistis terletak di antara pasar persaingan sempurna dengan monopoli. Slop permintaan bersifat elastis, berbeda dengan monopoli bersifat in elastis. Slop elastis karena terletak antara horisontal dan in elastis. Antar firm bertindak independen, dan hambatan masuk dalam industri rendah sehingga firm bebas keluar masuk.



Diferensiasi produk mengawali struktur pasar persaingan monopolistik. Penjual membuat beda produknya melalui dimensi fisik, lokasi, produk dan layanan. Perbedaan penampilan fisik, jumlah dan lokasi tertentu, layanan yang diberikan dan citra produk di benak konsumen. Struktur pasar persaingan monopolis diantaranya pada tampak pada minimarket, stasiun televisi radio.

Atas karakteristik tersebut, maka pembentukan harga di pasar persaingan monopolistik turun miring dari kiri atas ke kanan bawah dan bersifat elastis. Bersifat elastis, karena perubahan jumlah barang yang diminta lentur terhadap perubahan harga.

2. Lembar Kerja

- 1) Peserta disediakan beberapa komoditas, dalam hal ini setiap komoditas mencerminkan masing-masing struktur pasar (lihat lampiran 4).
- 2) Peserta berdiskusi secara kelompok untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan setiap komoditas dalam struktur pasar tertentu

3. Langkah Kerja

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal dalam menggunakan modul ini, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain:

- 1) Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada kegiatan belajar.
- 2) Peserta membagi diri dalam kelompok-kelompok kecil
- 3) Peserta mendiskusikan klasifikasi komoditas dalam struktur pasar
- 4) Peserta mempresentasikan hasil diskusi
- 5) Kerjakan pelatihan tiap standar kompetensi untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki atas materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar.

4. Lembar Pelatihan

- 1) Jelaskan mengapa pembentukan harga di pasar persaingan sempurna adalah sejajar dengan garis horizontal!
- 2) Jelaskan mengapa pada pasar monopoli seorang produsen memiliki kekuatan yang besar dalam penentuan harga!



Kegiatan Pembelajaran 6

Pasar Input

1. Lembar Informasi

Pasar input merupakan tempat bertemunya transaksi permintaan dan penawaran faktor produksi. Ada empat macam faktor produksi, yaitu faktor produksi alam, modal, tenaga kerja dan skill). Pada pasar faktor produksi ditawarkan sejumlah tenaga kerja, lahan, benda modal dan uang untuk memproduksi barang setengah selesai maupun barang jadi. Permintaan faktor produksi oleh produsen merupakan biaya produksi.

A. Pasar tenaga kerja

Pada pasar tenaga kerja produsen memberikan upah kerja bagi masyarakat yang menyerahkan ketenagaannya. Bagi komunitas tertentu, pekerjaan penduduk berhubungan dengan status sosialnya. Atas penggunaan faktor produksi tenaga kerja masyarakat yang memiliki faktor tersebut akan memperoleh balas jasa faktor produksi tenaga kerja, berbentuk upah tenaga kerja. Untuk memperoleh upah tenaga kerja tertentu diperlukan tingkat pendidikan tertentu, dan untuk memperolehnya diperlukan sejumlah pengorbanan.

Tenaga kerja berhubungan erat dengan jumlah penduduk dan produktivitas tenaga kerja. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak penawaran tenaga kerja. Demikian halnya semakin tinggi produktivitas penduduk maka semakin tinggi pula permintaan tenaga kerja.

Upah adalah balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja yang berjasa dalam proses produksi barang dan jasa. Upah yang diterima pekerja tergantung pada tinggi rendahnya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Berikut ini adalah teori upah yang berlaku:

- a. Teori upah normal oleh David Ricardo
Tingkat upah yang wajar yang dibayarkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pekerja, agar mereka dapat hidup sejahtera dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
- b. Teori upah besi oleh Ferdinand Lassale
Teori ini menekankan bahwa pengusaha selalu menekan upah serendah-rendahnya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dalam hal ini pekerja berada dalam posisi yang lemah.
- c. Teori upah etika



Teori ini bersumber dari kaum sosiolog gereja, yang menyatakan bahwa upah pada dasarnya bukan pada masalah seberapa besar upah, tetapi berapa besar upah itu seharusnya dapat menjamin kesejahteraan pekerja.

d. Teori produktivitas batas kerja oleh John Bates Clark

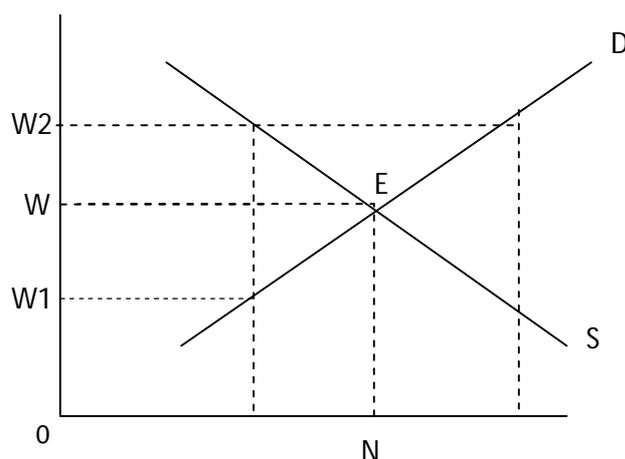
Tingkat upah memiliki kecenderungan sama dengan produktivitas dari tenaga kerja terakhir yang dibayar (*marginal worker*). Dengan demikian tingkat upah tidak dapat lebih tinggi dari produktivitas batas kerja sari pekerja.

Upah tenaga kerja berbeda ragam dan tingkatnya tergantung profesi, pekerjaan, pendidikan, dan mobilitasnya. Untuk menghargai hajat hidup yang layak bagi pekerja ditetapkan upah minimal regional, dan UMR tergantung pada kemampuan para pengusaha di tingkat regionalnya.

Pada dasarnya sistem pembayaran upah dapat dibedakan menjadi beberapa sistem, yaitu:

- Upah menurut waktu
- Upah menurut satuan hasil
- Upah borongan
- Upah bonus
- Penetapan upah minimum

Pada prinsipnya masyarakat menghendaki upah yang tinggi, sebab upah hakekatnya merupakan pendapatan masyarakat yang diterima sebagai balas jasa pemilikan faktor produksi tenaga kerja. Dipandang dari segi penawaran tenaga kerja, semakin tinggi upah maka akan semakin tinggi penawaran tenaga kerja. Sebaliknya dari sudut permintaan tenaga kerja, semakin tinggi upah kerja maka semakin rendah tenaga kerja yang diminta firm. Penampakan upah tenaga kerja, dijelaskan dalam gambar 5.14.



Gambar 5.14. Upah tenaga kerja

Gambar tersebut menjelaskan upah tenaga kerja terbentuk pada OW dengan jumlah tenaga kerja sebesar N. Pada tingkat upah ekuilibrium, terjadi

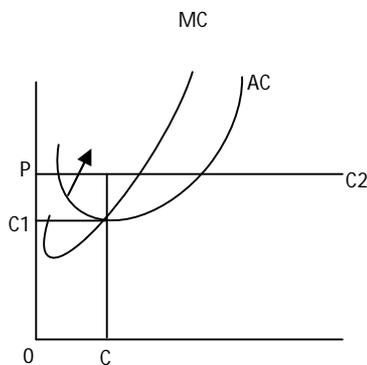


perpotongan permintaan dan penawaran tenaga kerja di titik E. Jika upah tenaga kerja naik menjadi OW2, terjadi excess supply dimana penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja. Sebaliknya jika upah tenaga kerja turun menjadi OW1, maka terjadi excess demand dimana permintaan tenaga kerja lebih besar dari penawaran tenaga kerja.

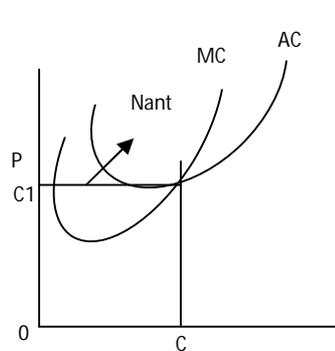
B. Pasar lahan

Lahan merupakan biaya produksi tetap bagi produsen. Pemilik lahan akan mendapatkan sewa modal yang disebut dengan rent, atas penggunaannya dalam memproses produksi oleh perusahaan.

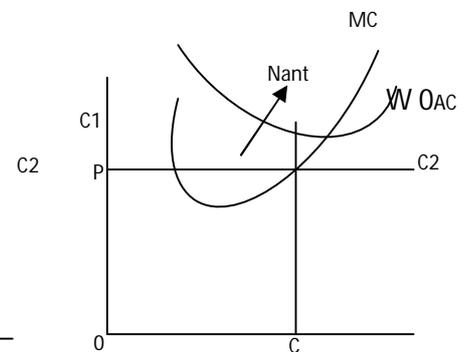
Lahan dibedakan antara lahan subur, lahan sedang kesuburannya dan lahan kurang subur. Klasifikasi tersebut mengandung tingkat produktivitas lahan yang berbeda pula, dimana lahan yang subur memiliki produktivitas yang tinggi, lahan sedang kesuburannya memiliki tingkat produktivitas sedang dan lahan yang kurang subur memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Bagi produsen yang menggunakan lahan tersebut diharapkan memiliki rent yang berbeda, dimana untuk lahan dengan produktivitas tinggi akan memberikan surplus rent yang tinggi pula. Sebaliknya untuk lahan yang memberikan produktivitas yang rendah memungkinkan memperoleh rent yang rendah bahkan rugi. Penampakan perolehan rent dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 15.a



Gambar.15.b



Gambar.15.c

Gambar 5.15. Gambar Penentuan Tingkat Sewa Lahan

Perolehan rent pada gambar 5.15a > 5.15b > 5.15c, sesuai dengan tingkat produktivitas lahan. Produsen akan memilih lahan pada gambar 5.15a karena memberikan rent yang paling tinggi atau super rent. Pada lahan yang tingkat produktivitasnya tinggi akan memberikan tingkat rent yang lebih dari pada lahan yang memiliki tingkat produktivitas rendah.



C. Pasar modal

Modal memegang peranan penting dalam perusahaan disamping lahan dan tenaga kerja. Pemilik faktor produksi modal akan mendapatkan balas jasa modal berupa bunga modal. Pemilik modal mendapat bunga modal sebagai balas jasa, karena pemilik tersebut tidak dapat menggunakan modalnya, dimana modal tersebut dipergunakan pihak lain dalam kegiatan perekonomian. Faktor produksi modal juga merupakan biaya tetap bagi perusahaan.

Modal yang ditanam oleh pemilik faktor, tergantung pada pandangan masyarakat yang memiliki faktor tersebut. Ada golongan masyarakat pemilik modal yang acuh terhadap balas jasa modal yang diperolehnya, dan ada juga yang tidak acuh terhadap tinggi rendahnya bunga modal. Bahkan ada yang sangat tergantung dan tidak tergantung pada besarnya bunga modal.

Bentuk pasar modal, tidak hanya tabungan tetapi juga sekuritas atau surat berharga. Pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal pada umumnya terdiri dari saham, obligasi dan sertifikat right. Di BEI sekuritas yang diperdagangkan meliputi saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi dan sertifikat right.

Saham, adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham biasa memiliki hak memilih dalam rapat umum pemegang saham. Saham preferen, merupakan saham yang memiliki hak istimewa atas dividen dalam jumlah yang tetap. Obligasi, adalah merupakan tanda surat hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Obligasi konversi, obligasi yang dapat ditukarkan menjadi saham biasa. Sertifikat right, sekuritas yang memberikan hak untuk membeli saham baru dengan harga khusus. Para pemilik saham, akan mendapatkan dividen, dan pada pemegang obligasi mendapatkan bunga.

Saham dapat diperjualbelikan, karena itu saham itu memiliki mobilitas tinggi. Pemegang saham merupakan peserta pemilik perusahaan yang ikut menikmati keuntungan sebanding dengan modal yang disertakan. Tanggung jawab pemegang saham atas utang-utang perusahaan terbatas maksimal sampai jumlah nilai saham yang di miliki. Nilai saham terdiri dari nilai nominal dan nilai kurs. Besarnya nilai yang tercantum dalam lembaran saham disebut nilai nominal, sedangkan nilai yang dibayarkan pemegang saham disebut nilai kurs.

Modal persero yang ditetapkan dalam akte pendiri disebut modal dasar persero yang jumlahnya didasarkan atas nilai nominal per saham dikalikan dengan jumlah lembar saham. Besarnya modal yang di setor pemegang saham disebut modal yang disetor yang nilainya di hitung berdasarkan jumlah lembar saham yang terjual dikalikan dengan kurs yang terjadi pada saat penjualan. Jika



saham dijual diatas nilai nominal, kelebihanannya disebut premi atau agio saham. Bila saham dijual dibawah nilai nominal maka selisihnya disebut diskonto.

Jenis saham terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Saham biasa diterbitkan dengan baik atas nama maupun atas unjuk. Pada saham atas nama, nama pemilik di tuliskan didalam lembaran saham, sedangkan pada saham atas unjuk, nama pemilik tak dicantumkan. Saham yang dapat diperdagangkan adalah saham atas unjuk. Ada dua jenis saham (1). Saham istimewa atau saham preferen. Saham ini diterbitkan oleh perusahaan bertujuan untuk memperluas kemungkinan inventasi, antara lain dengan memberikan hak-hak istimewa tertentu kepada pemegangnya, biasanya dalam hal pembagian laba. Saham istimewa dapat bersifat kumulatif dan non kumulatif. Bersifat kumulatif bila pemegang saham diberikan hak dividen yang besarnya tetap diperhitungkan secara kumulatif pada tahun-tahun berikut. Non-kumulatif, jika terjadi kerugian maka hak dividen pada tahun yang bersangkutan hilang, sehingga tidak diperhitungkan lagi dividen tahun-tahun berikutnya: dan (2). Saham biasa, adalah saham yang memberikan pemegangnya hak suara serta hak atas sebagian laba yang besarnya berubah-ubah tergantung dari dasarnya laba yang diperoleh perusahaan. Dividen untuk para pemegang saham akan baru diberikan bila pemegang saham istimewa telah menerima deviden tetap yang menjadi hak mereka.

Jenis saham lainnya adalah saham aktif, saham berhak suara, saham donasi, saham indikator, saham non pari, saham tanpa suara, dan saham terdaftar. Saham aktif adalah saham yang banyak di perdagangkan di bursa. Saham berhak suara adalah saham yang memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham. Saham donasi adalah saham yang diserahkan kembali kepada perusahaan sebagai hadiah untuk dijual lagi guna memperoleh dan tambahan. Saham indikator adalah saham yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan saham lainnya dalam bursa.

Saham non pari, saham yang tidak dicantumkan nilai nominalnya. Saham tanpa hak suara adalah saham yang tidak memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Saham terdaftar merupakan saham yang nama pemiliknya tercantum pada saham bersangkutan dan daftar pada emiten.

2. Lembar Pelatihan

- 1) Bagaimanakah dampak penentuan tingkat upah minimum regional yang lebih tinggi dari pada tingkat upah pada pasar kompetitif?
- 2) Harga tanah dari tahun ke tahun semakin mahal. Analisislah faktor apakah yang menyebabkan kenaikan harga tanah dengan menggunakan pendekatan permintaan dan penawaran tanah!



Kegiatan Pembelajaran 7

Permasalahan Dalam Perekonomian Suatu Negara

1. Lembar Informasi

Teori Ekonomi diajarkan agar kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan dalam dalam ekonomi makro, dimana kemudian masalah-masalah itu kita analisa sehingga kita dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun permasalahan ekonomi makro yang kerap kali dihadapi pemerintah antara lain:

1) Antara Inflasi dan Kemiskinan

Inflasi secara umum didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus menerus. Inflasi menjadi masalah menakutkan bagi perekonomian suatu Negara, jika harga umum mengalami kenaikan (inflasi) tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita, maka jelas daya beli masyarakat akan turun. Jika daya beli masyarakat menurun maka barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen akan tidak laku dipasar produsen mengalami kesusahan dalam memproduksi dan menjual barangnya. Tidak lakunya barang dan jasa tersebut akan mengakibatkan produsen akan menutup perusahaannya. Penutupan perusahaan tersebut akan membawa dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawannya. Sehingga inflasi ini akan membuat masyarakat jatuh miskin. Hal ini jika berlangsung terus menerus bisa menciptakan lingkaran setan kemiskinan.

Lingkaran kemiskinan ini dimulai dari kondisi pendapatan nasional (GDP/GNP) yang rendah, sehingga mengakibatkan saving (tabungan) masyarakat rendah. Saving masyarakat yang rendah akan mengakibatkan investasi juga rendah. Karena investasi rendah maka tidak ada lapangan kerja yang tercipta sehingga pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat maka secara otomatis kemiskinan juga akan meningkat selain itu GDP/GNP juga akan tetap rendah. Apabila hal ini terus berlangsung maka kita akan terjerumus dalam lembah kemiskinan.

2) Pemerataan pendapatan

Di negara berkembang peningkatan pendapatan nasional yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, yaitu mereka-mereka yang menguasai industri menengah dan besar. Akan tetapi penguasaan industri tersebut hanya dikuasai sebatas orang-orang-orang yang dekat dengan penguasa. Para konglomerat ini tumbuh karena mendapat fasilitas dari



pemerintah. Karena hanya mereka yang menguasai industry-industri besar, akhirnya hanya merekalah yang memiliki sebagian besar pendapatan nasional.

2. Lembar Pelatihan

- 1) Perhatikan pernyataan berikut ini:

Tingkat inflasi dan kemiskinan memiliki korelasi yang positif.

Pertanyaan: Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan jawaban Anda.

- 2) Di Indonesia, distribusi pendapatan masyarakat adalah tidak merata. Menurut Anda, upaya apakah yang dapat ditempuh untuk memperkecil kesenjangan dalam distribusi pendapatan di Indonesia?



Kegiatan Pembelajaran 8

Pendapatan Nasional

1. Lembar Informasi

1.1. Konsep Pendapatan Nasional

A. Pengertian Pendapatan Nasional

Ada tiga definisi tentang konsep pendapatan nasional, yaitu produk domestik bruto (PDB), produk domestik regional bruto (PDRB), dan produk nasional bruto (PNB). Ketiga konsep tersebut memiliki perbedaan dalam cakupan perhitungan.

Produk domestik bruto (PDB) diartikan sebagai seluruh jumlah produksi yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan produk domestik regional bruto (PDRB) diartikan sebagai Jumlah total seluruh produksi dari seluruh sektor perekonomian suatu wilayah yang dihasilkan oleh masyarakat pada periode tertentu (1 tahun). Dengan demikian perbedaan utama antara PDB dan PDRB adalah pada ruang lingkup wilayah perhitungan, jika PDB lingkup wilayahnya adalah negara, sedangkan PDRB lingkup wilayahnya dapat berupa propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Pendapatan nasional Bruto (PNB) didefinisikan sebagai jumlah seluruh produksi yang dihasilkan oleh masyarakat (warga Negara asli) baik yang ada didalam negeri maupun diluar negeri dalam periode tertentu (1 tahun). Adapun perbedaan antara PDB dan PNB terletak pada subyek pelaku ekonomi. Dalam hal ini PDB memperhitungkan output setiap masyarakat yang ada pada suatu negara baik WNI maupun WNA (dalam batasan negara), sedangkan PNB memperhitungkan hanya output yang dihasilkan oleh WNI baik yang berada di dalam batasan negara maupun di luar batasan negara.

B. Perhitungan Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional pada umumnya dihitung dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. Dalam menghitung pendapatan nasional, digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

1) Pendekatan produksi

Pendekatan ini berdasarkan dari jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam perekonomian pada periode tertentu.



Nilai akhir adalah barang yang siap dikonsumsi dan tidak membutuhkan proses produksi berikutnya. Sedangkan barang antar adalah barang yang masih memiliki nilai tambah apabila diproses berikutnya. Atau dengan kata lain pendekatan ini menghitung nilai barang akhir atau menjumlahkan semua nilai tambah

Contoh Perhitungan Pendapatan nasional pendekatan Produksi

Jenis Produsen	Hasil	Nilai Akhir	Nilai Tambah
Produsen I	Kapas	500	500
Produsen II	Benang	1000	500
Produsen III	Kain	2.500	1.500
Produsen IV	Pakaian Jadi	5.000	2.500
Jumlah			5.000

2) Pendekatan pendapatan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan dengan cara menghitung semua pendapatan dari faktor produksi seperti pendapatan dari tanah (sewa), modal (bunga), tenaga kerja (upah), dan kewirausahaan (profit).

3) Pendekatan pengeluaran

pendapatan nasional yang dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, swasta/perusahaan, pemerintah dan sektor luar negeri.

Pengeluaran rumah tangga adalah konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran perusahaan adalah Investasi swasta (I), pengeluaran pemerintah adalah belanja pemerintah (G) dan pengeluaran sektor luar negeri adalah ekspor (X) dan Impor (M), sehingga dikenal dengan rumus: $Y = C + I + G + M$

C. Manfaat perhitungan pendapatan nasional

Hasil dari perhitungan pendapatan nasional mempunyai manfaat bagi negara yang bersangkutan, diantaranya:

- Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara (agraris, industri, atau perdagangan).
- Untuk mengetahui komposisi pendapatan nasional di berbagai sektor.
- Untuk mengetahui perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun.
- Untuk mengetahui pembagian pendapatan diantara golongan masyarakat.



- e. Untuk mengetahui pendapatan perkapita masyarakat.
- f. Untuk mengetahui perbandingan tinggi rendahnya tingkat perekonomian dalam negeri dan luar negeri.
- g. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah atau wilayah dalam suatu negara.
- h. Sebagai bahan acuan untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam rencana pembangunan nasional.

D. Komponen pendapatan nasional

Komponen pendapatan nasional mencakup:

- a. Produk Nasional Bruto (PNB)
- b. Produk Nasional Netto (PNN)
- c. Pendapatan Nasional (PN)
- d. Pendapatan Perseorangan (PP)
- e. Pendapatan Disposabel (PD)

Perhitungan pendapatan nasional dapat dilihat dari contoh berikut:

PNB -----	:	100	
Penyusutan -----	:	5	
PNN -----	:	95	-
Pajak langsung -----	:	5	-
PN -----	:	90	
Pembayaran transfer : 2	}		
Pembayaran bunga : 1			
		+ -----	: 3
Laba tak dibagikan : 2	}		
Pajak perusahaan : 3			
Pemb. jaminan sos. : 8			
		- -----	: 13
PP -----	:	80	-
Pajak langsung -----	:	5	-
PD -----	:	75	
Konsumsi -----	:	60	-
Tabungan perseorangan -----	:	15	-

E. Kesulitan Dalam Menghitung Pendapatan Nasional

- a. Kurang lengkapnya data statistik dari berbagai lapangan kegiatan ekonomi.
- b. Timbulnya perhitungan dobel (*double counting*)
- c. Sulitnya memisahkan secara jelas dan tegas barang antara dan barang akhir.



Yang Tidak Diperhitungkan Dalam Pendapatan Nasional:

- a. Perubahan nilai atas barang dan jasa akibat inflasi atau deflasi serta naik turunnya kurs mata uang dollar (*capital gain and capital losses*).
- b. Kegiatan yang bersifat illegal (penyelundupan).

1.2 Indeks Harga dan Inflasi

A. Indeks Harga

Dalam pasar terkadang berlaku kenaikan harga tetapi kenaikan harga tersebut tidak berlaku pada seluruh barang hanya berlaku pada kebanyakan barang. Terjadinya tingkat perubahan harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu dibentuk. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah Indeks Harga Konsumen, atau lebih dikenal dengan istilah: *Consumer Price Indeks* (CPI) yaitu harga dari barang-barang yang digunakan para konsumen.

B. Inflasi

Inflasi merupakan peristiwa ekonomi yang ditandai dengan menurunnya kekuatan nilai tukar satuan moneter. Menurunnya kemampuan nilai tukar satuan moneter atau uang terjadi manakala harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Situasi ini disebabkan karena jumlah uang yang beredar dalam masyarakat lebih banyak dari pada jumlah barang dan jasa yang tersedia.

Jenis inflasi dapat dikelompokkan antara lain berdasarkan tingkat keparahan, penyebabnya, dan sumber asal inflasi.

Berdasarkan tingkat keparahan

Berdasarkan berat ringannya kenaikan harga yang terjadi, inflasi dikategorikan sebagai berikut :

- a. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun)
- c. Infasi berat (antara 30% - 100% setahun)
- d. Hiperinflasi (diatas 100% setahun)

Berdasarkan penyebab kenaikan harga

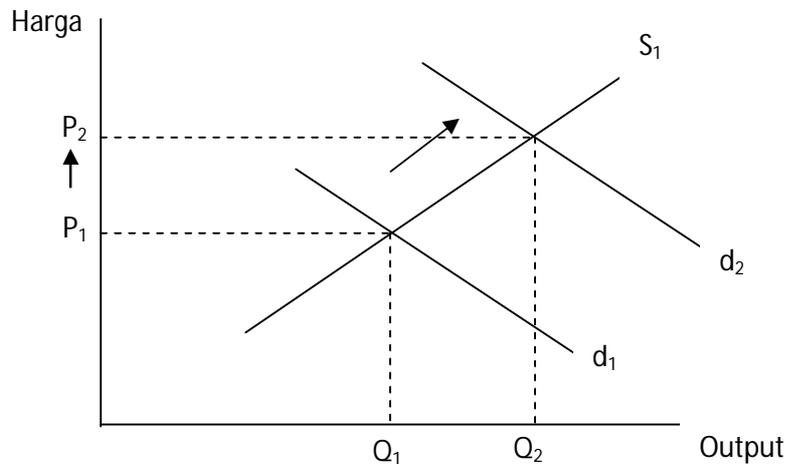
a. *Inflasi tarikan permintaan*

Inflasi tarikan permintaan terjadi apabila sector perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat dalam pasar akan menimbulkan kekurangan barang/kelebihan permintaan shg mendorong kenaikan harga.

Sebagaimana terlihat pada gambar 5.16, awal keseimbangan pasar terjadi pada tingkat harga P1 dan jumlah barang Q1. Kenaikan



permintaan terjadi dari d_1 ke d_2 , sedangkan penawaran tetap. Akibatnya harga naik dari P_1 ke P_2 .



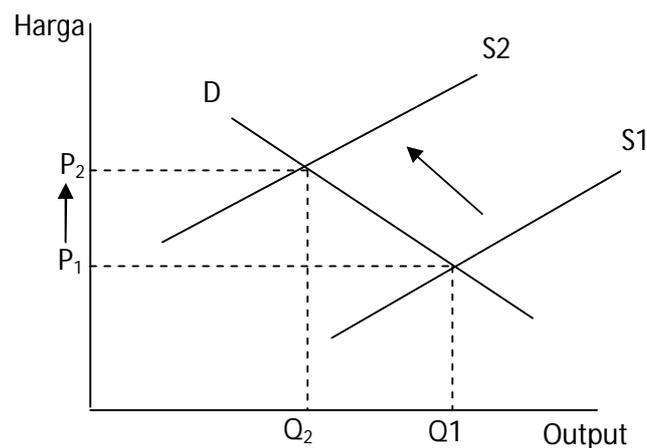
Gambar 5.16. Demand – Pull Inflation

b. Inflasi desakan biaya

Inflasi desakan biaya adalah inflasi (kenaikan – kenaikan harga) yang disebabkan oleh kenaikan ongkos produksi. Kenaikan ongkos produksi dalam jangka waktu yang cukup lama akan membawa kenaikan pada harga barang, sehingga menimbulkan *Cost – Push Inflation*.

Penyebab pergeseran penawaran bermacam-macam, diantaranya

- Tingkat upah (*Wage Cost-Push Inflation*)
- Harga barang dalam negeri (*Price-Push Inflation*)
- Harga barang luar negeri (*Import Cost-Push Inflation*)



Gambar 5.17. Cost-Push Inflation

Gambar 5.17 menunjukkan proses kenaikan harga akibat adanya kenaikan biaya produksi. Semula keseimbangan pasar berada pada tingkat harga P_1 dan jumlah barang Q_1 . Akibat kenaikan biaya produksi,



kurva penawaran bergeser ke kiri, sedangkan kurva permintaan tetap. Keseimbangan pasar pun bergeser harga naik ke P2 dan jumlah keseimbangan Q2.

Berdasarkan Asal Inflasi

- Imported inflation*, yaitu inflasi yang terjadi akibat mengimpor produk dari negara yang sedang mengalami inflasi
- Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*), yaitu inflasi yang bersumber dari kenaikan jumlah uang beredar baik yang bersumber dari pencetakan uang oleh pemerintah, APBN yang defisit, bahkan bisa juga disebabkan karena kegagalan panen.

Tingkat inflasi terutama untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya. Untuk menentukannya perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari suatu tahun tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya. Misal: pada akhir tahun 2010 indeks harga konsumen adalah 231 dan pada akhir tahun 2011 indeks tersebut adalah 240. Berapa tingkat inflasi dalam 2011? Tingkat inflasi pada tahun 2011 adalah:

$$\frac{240 - 231}{231} \times 100 = 3,9 \%$$

Jadi tingkat inflasi pada tahun 2011 adalah 3,9 persen

1.3 Menentukan Pendapatan Perkapita

Untuk menentukan tingkat dan pertambahan kemakmuran penduduk perlu dihitung pendapatan per kapita di berbagai tahun. Contoh dimisalkan pada tahun 2010 jumlah penduduknya 12 juta jiwa dengan pendapatan nasional Rp. 120 Trilliun dan meningkat 12,2 juta jiwa dan pendapatan nasionalnya Rp. 126 Trilliun pada tahun 2011. Berdasarkan data tersebut, pendapatan perkapita tahun 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pendapatan Per kapita 2010} = \frac{\text{Rp } 120 \text{ T}}{12 \text{ juta jiwa}} = \text{Rp } 10 \text{ Juta}$$

$$\text{Tingkat Pendapatan Per kapita 2011} = \frac{\text{Rp } 126 \text{ T}}{12,2 \text{ juta jiwa}} = \text{Rp } 10,3278 \text{ juta}$$

Adapun pertambahan pendapatan perkapita pada 2011 adalah

$$= \frac{10,3278 \text{ juta} - 10,000 \text{ juta}}{10 \text{ juta}} \times 100 = 3,3\%$$

2. Lembar Pelatihan

- Jelaskan perbedaan antara GDP dan GNP
- Diketahui data perekonomian sebagai berikut:
Konsumsi Rp4000



Investasi Rp1000
Penyusutan Rp500
Pengeluaran pemerintah Rp1500
Ekspor Rp700
Impor Rp450
Gaji Rp5000
Profit Rp1250
Tabungan Rp1500

Berdasarkan data di atas buktikan bahwa hasil perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran sama dengan hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan penerimaan!

- 3) Jelaskan perbedaan antara *demand pull inflation* dan *cost push inflation*!
- 4) Berikut data GDP dan penduduk suatu negara:

Tahun	2009	2010	2011
GDP	100	110	156
Penduduk	10	11	12

Berdasarkan data tersebut, hitunglah laju pertumbuhan pendapatan per kapita selama 2009 – 2011!



Kegiatan Pembelajaran 9

Konsumsi dan Investasi

1. Lembar Informasi

1.1. Konsumsi

A. Pengertian Konsumsi

Secara makro ekonomi konsumsi adalah total pengeluaran (kegiatan belanja barang atau jasa) yang dilakukan oleh perekonomian secara keseluruhan. Pengeluaran ini dilakukan oleh pihak rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara bergantung pada besarnya pendapatan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan.

Secara mikro ekonomi konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna/manfaat suatu barang atau jasa secara sekaligus maupun berangsur-angsur.

Tabungan didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi. Jika: $Y > C = Saving$, sebaliknya jika: $Y < C = dissaving$ (utang).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Dan Tabungan

- a. Pendapatan
- b. Tingkat bunga
- c. Kekayaan yang telah terkumpul (warisan dan tabungan)
- d. Keadaan perekonomian
- e. Sikap hemat
- f. Program dana pensiun
- g. Tradisi/adat istiadat
- h. Mode
- i. Selera



C. Hubungan Antara Pendapatan, Kecenderungan Mengkonsumsi dan Menabung

Kecenderungan untuk mengkonsumsi (*Propensity to Consume* – PTC)

$$PTC = \frac{C}{Y}$$

Kecenderungan untuk menabung (*Propensity to Save* – PTS)

$$PTS = \frac{S}{Y}$$

Hubungan:

$$\begin{array}{l}
 Y = C + S \text{ atau } Y = C + I \quad \longrightarrow \quad S = I \\
 \frac{Y}{Y} = \frac{C}{Y} + \frac{S}{Y} \quad \longrightarrow \quad 1 = PTC + PTS
 \end{array}$$

D. Hubungan Pendapatan, Kecenderungan Mengkonsumsi dan Menabung Marginal

Kecenderungan Mengkonsumsi Marginal (*Marginal Propensity to Consume* (MPC)

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

Kecenderungan Menabung Marginal *Marginal Propensity to Save* (MPS)

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

Hubungan:

$$\begin{array}{l}
 \Delta Y = \Delta C + \Delta S \\
 \frac{\Delta Y}{\Delta Y} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y} \quad \longrightarrow \quad 1 = MPC + MPS
 \end{array}$$

Menghitung PTC, PTS, MPC, dan MPS

Y	C	S	PTC	MPC	PTS	MPS
10.000	15.000	- 5000	1,5	-	- 0,5	-
				0,5	-	0,5
20.000	20.000	0	1	-	0	-
				0,4	-	0,6
30.000	24.000	6.000	0,8	-	0,2	-

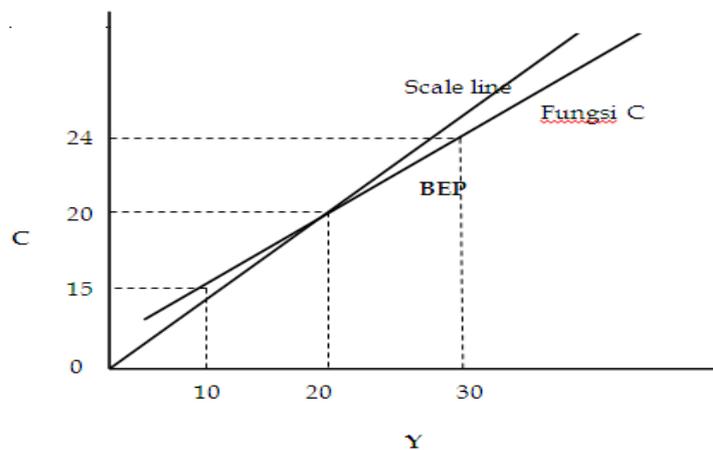


E. Fungsi Konsumsi Dan Tabungan

Konsumsi dan tabungan bergantung pada besarnya pendapatan: C , $S = f(Y)$. Fungsi konsumsi adalah suatu garis yang menunjukkan hubungan tingkat konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan. Perhatikan data berikut ini:

Y	C
10.000	15.000
20.000	20.000
30.000	24.000

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel di atas, maka gambar kurva konsumsi atas data tersebut adalah sebagai berikut:



Fungsi tabungan adalah suatu garis yang menunjukkan hubungan tingkat tabungan pada berbagai tingkat pendapatan. Pada dasarnya pendapatan digunakan untuk konsumsi dan menabung atau $Y = C + S$. Oleh karenanya, tabungan dapat diperoleh melalui $S = Y - C$. Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi data berikut ini:

Y	C	S
10.000	15.000	- 5000
20.000	20.000	0
30.000	24.000	6.000

F. Menghitung Persamaan Fungsi Konsumsi dan Tabungan

Konsumsi bergantung pada besar kecilnya pendapatan, $C = f(Y)$. Pada tingkat pendapatan sama dengan nol, ada kecenderungan masyarakat untuk tetap berkonsumsi, ini disebut sebagai konsumsi



minimal, dan setiap tambahan pendapatan akan diikuti kecenderungan menambah konsumsi atau konsumsi marginal.

Bila konsumsi minimal diberi simbol "a" dan konsumsi marginal diberi simbol "b", maka:

$$C = a + bY \quad \text{atau} \quad C = a + MPC.Y$$

Konsumsi minimal pada hakekatnya sebagai jumlah rata-rata konsumsi (APC.Y) dikurangi konsumsi marginal (MPC.Y), berarti:

$$C = (APC - MPC) Y + bY$$

$$\text{Fungsi Konsumsi: } C = a + bY \quad \text{atau} \quad C = (APC - MPC) Y + bY$$

$$\text{Fungsi Saving: } S = (1 - b) Y - a \quad \text{atau} \quad S = (1 - APC) Y$$

Penjelasan:

$$1. Y = C + S$$

$$\begin{aligned} S &= Y - C \\ &= Y - (a + bY) \\ &= Y - a - bY \\ &= Y - bY - a \end{aligned}$$

$$S = (1 - b) Y - a$$

$$2. S = (1 - b) Y - a$$

$$\begin{aligned} &= Y - bY - (APC - MPC) Y \\ &= Y - bY - APCY + MPCY \\ &= Y - bY - APCY + bY \\ &= Y - APCY \end{aligned}$$

$$S = (1 - APC) Y$$

Contoh:

Diketahui: $Y = 200$ milyar
 $C = 150$ milyar
 $Y = 300$ milyar
 $C = 200$ milyar

Ditanya: 1. Persamaan fungsi konsumsi
 2. Persamaan fungsi saving
 3. Grafik fungsi konsumsi dan saving

Jawab:

$$APC = \frac{150}{200} = 0,75$$

$$MPC = \frac{50}{100} = 0,50$$

$$\begin{aligned} a &= (APC - MPC) Y \\ &= (0,75 - 0,50) Y \\ &= 0,25 Y \\ &= 0,25 \cdot 200 \text{ milyar} \\ &= 50 \text{ milyar} \end{aligned}$$

$$C = a + bY \quad \text{maka} \quad C = 50 + 0,50Y$$

$$\begin{aligned} S &= (1 - b) Y - a \\ &= (1 - 0,50) Y - 50 \end{aligned}$$

$$S = -50 + 0,50 Y$$

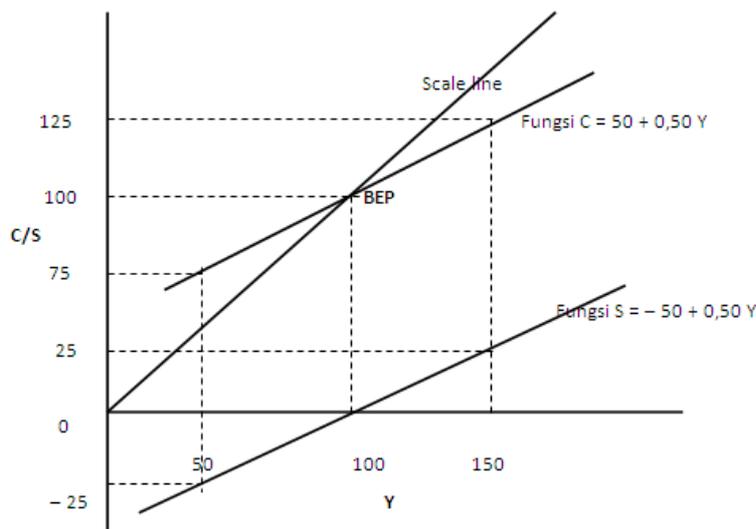


Untuk membuat grafik fungsi konsumsi dan fungsi saving, dibuat dulu titik keseimbangan (*break even point - BEP*), yaitu:

$$\begin{aligned}
 Y &= C \\
 Y &= 50 + 0,50 Y \\
 Y - 0,50 Y &= 50 \\
 0,50 Y &= 50 \\
 \mathbf{Y} &= \mathbf{100}
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, membuat tabulasi Y, C, dan S

Y	C = 50 + 0,50 Y	S = - 50 + 0,50 Y
50	75	- 25
100	100	0
150	125	25



1.2. INVESTASI (INVESTMENT)

Investasi adalah penanaman modal yang akan mendatangkan pendapatan baru dan modal baru bagi masyarakat. Adapun macam-macam investasi jika ditinjau dari:

- 1) Sumber pembentukan investasi:
 - a. Investasi pemerintah (*public investment*).
 - b. Investasi swasta (*privat investment*).
- 2) Asal pembentukan investasi:
 - a. Investasi domestik (*domestic investment*)
 - b. Investasi asing (*foreign investment*)
- 3) Bentuk-bentuk investasi:
 - a. Investasi otonom (*autonomous investment*): yaitu investasi yang berlangsung secara otonom: (1) timbul bukan karena adanya tambahan



pendapatan, (2) biayanya banyak, (3) tidak memberikan keuntungan secara langsung.

b. *Induced investment*: investasi yang didorong oleh investasi sebelumnya dan timbul karena adanya tambahan pendapatan.

4) Sifat-sifat investasi:

a. Investasi yang berupa uang (*money investment*)

b. Investasi yang bukan berupa uang (*riil investment*)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi antara lain:

1) Faktor Ekonomi:

a. Ramalan keuntungan yang akan diperoleh

b. Tambahan pendapatan

c. Perubahan nilai kurs

d. Tingkat suku bunga bank

2) Faktor Non Ekonomi:

a. Kebijakan pemerintah

b. Perubahan teknologi

c. Harapan hidup di masa depan

b. Situasi politik

Sedangkan faktor-faktor yang menentukan investasi:

1) Tingkat suku bunga yang dibayarkan dalam penggunaan modal investasi (*rate of interest*) = i , dan i ditentukan oleh permintaan uang (*demand of money*) dan penawaran uang (*supply of money*).

2) Hasil yang diharapkan pada masa depan akan diperoleh dalam penanaman modal (*marginal efficiency of capital*) = r , dan r ditentukan oleh pengharapan laba (*prospective yield*) dan biaya investasi (*cost investment*). Investasi akan dilakukan bilamana: $r > i$, dan bila $r < i$, sebaiknya uang yang sudah ada dibungakan saja.

2. Lembar Pelatihan

1) Jelaskan pertimbangan apakah yang menjadi dasar seseorang melakukan investasi!

2) Diketahui fungsi konsumsi: $C = 50 + 0,4Y$. Jika pendapatan nasional meningkat dari Rp 150.000,00 menjadi Rp 250.000,00, hitunglah tambahan konsumsinya!

3) Diketahui fungsi konsumsi: $C = 50 + 4/5Y$. Jika pendapatan nasional meningkat dari Rp 150juta menjadi Rp 250juta, hitunglah besarnya perubahan investasi!

4) Sebagai seorang pelajar, Amir setiap hari menerima uang saku. Ketika uang saku Amir sebesar Rp5.000,00 per hari, ia menyisihkan Rp1.500,00



untuk di tabung. Namun ketika uang sakunya bertambah menjadi Rp8.000,00 per hari, ia menyisihkan Rp2.700,00 untuk di tabung. Berdasarkan data tersebut, tentukan:

- a. Fungsi konsumsi
- b. Fungsi tabungan
- c. Kurva konsumsi



Kegiatan Pembelajaran 10

Uang dan Perbankan

1. Lembar Informasi

1.1. Uang

A. Pengertian Uang

Uang merupakan alat pembayaran yang sah. Dalam hal ini uang berfungsi sebagai alat tukar menukar, alat satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, alat penyelesaian utang piutang. Adapun syarat-syarat uang antara lain:

- a. Diterima umum dan sah menurut undang-undang
- b. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
- c. Mudah dibawa ke mana-mana
- d. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
- e. Tahan lama
- f. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih)
- g. Bendanya mempunyai mutu yang sama

Ada dua macam nilai uang, yaitu nilai nominal dan nilai intrinsik. Nilai nominal merupakan nilai yang tertulis pada setiap mata uang. Misalnya, disalah satu sisi uang logam tertulis Rp.1.000,00 maka nilai nominal uang tersebut ialah Rp.1.000,00. Sedangkan nilai intrinsik merupakan nilai uang yang diukur dari bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Misalnya, nilai intrinsik uang kertas Rp.20.000,00 ialah nilai kertas yang digunakan dalam pembuatan uang tersebut.

B. Jenis Uang

- 1) Berdasarkan bahan pembuat uang, mencakup uang logam dan uang kertas
- 2) Berdasarkan nilai uang, mencakup uang bernilai penuh dan uang bernilai tidak penuh.
- 3) Berdasarkan wilayah berlaku, mencakup uang domestik, uang regional dan uang internasional.
- 4) Berdasarkan lembaga atau badan yang mengeluarkan, mencakup uang kartal dan uang giral

Uang kartal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berlaku di seluruh lapisan masyarakat.



- b. Masyarakat umum harus menerimanya sebagai alat pembayaran, alat tukar dan alat pelunasan utang.
- c. Nilai nominalnya sudah tertera pada mata uang dengan nilai tertentu
- d. Dijamin oleh pemerintah
- e. Adanya kepastian pembayaran sesuai nilai nominalnya.

Uang giral memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berlaku dikalangan masyarakat tertentu.
- b. Masyarakat umum boleh menolaknya sebagai alat tukar dan alat pelunasan utang.
- c. Besar nilai nominalnya bebas dan harus ditulis dahulu sesuai kebutuhan.
- d. Dijamin oleh bank yang mengeluarkan.
- e. Belum adanya kepastian pembayaran karena tergantung dari ketersediaan dana dan kepastian hukum.

C. Permintaan Uang

Permintaan uang mencerminkan jumlah uang yang diinginkan masyarakat dalam suatu perekonomian. Adapun teori tentang permintaan uang antara lain:

- 1) Teori keynes
- 2) Teori kuantitas
 - a. Teori Irving Fisher
 - b. Teori Cambridge
 - c. Teori Modal Milton Friedman

1) Teori Permintaan Uang: Teori Keynes

Menurut John Maynard Keynes, alasan orang memegang uang tunai ada 3 yaitu :

- a. Motif transaksi (*Transaction Motive*)

Motif ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang untuk tujuan transaksi ini ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan ($MD_t = f(Y)$), artinya semakin besar tingkat pendapatan yang dihasilkan, maka jumlah uang diminta untuk transaksi juga mengalami peningkatan demikian sebaliknya.



- b. **Motif Berjaga-jaga (*Precautionary Motive*)**
Selain untuk membiayai transaksi, maka uang diminta pula oleh masyarakat untuk keperluan di masa mendatang yang sifatnya berjaga-jaga. Besarnya permintaan uang untuk berjaga-jaga ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan pula. Semakin besar tingkat pendapatan permintaan uang untuk berjaga-jaga pun semakin besar. $MD_p = f(Y)$
- c. **Motif Spekulasi (*Speculation Motive*)**
Pada suatu sistem ekonomi modern dimana lembaga keuangan masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya bagi kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga, seperti obligasi pemerintah, saham, atau instrumen lainnya. Faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan uang dengan motif ini adalah besarnya suku bunga, dividen surat-surat berharga, ataupun capital gain, fungsi permintaannya adalah $MD_s = f(i)$.

Dari ketiga motif diatas, maka formula untuk **permintaan uang menurut Keynes** adalah: $MD = MD_t + MD_p + MD_s$. Teori keuangan yang dikemukakan Keynes pada umumnya menerangkan 3 hal, yaitu:

- Tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta (menggunakan uang)
- faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga
- efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara.

2) **Teori Permintaan Uang: Teori Irving Fisher**

Rumus : $M \times V = P \times T$ atau $MV = PT$

M = jumlah uang beredar

V = tingkat perputaran uang (*velocity*), yaitu berapa kali suatu mata uang pindah tangan dari satu orang kepada orang lain dalam satu periode tertentu

P = harga barang

T = volume barang dalam transaksi.

3) **Teori Permintaan Uang: Teori Cambridge Atau *Marshall Equation***

Alfred Marshall menekankan pada bagian dari pendapatan (GNP) yang diwujudkan dalam bentuk uang kas.

Rumus : $M = k.Y$

Marshall memandang bahwa seseorang selalu menginginkan bagian tertentu dari pendapatannya (Y) dipegang dalam bentuk uang



kas yang dinyatakan dengan k . Jadi, $k.Y$ merupakan keinginan seseorang akan uang kas (M).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Uang

- 1). Kekayaan dari masyarakat
- 2). Tersedianya fasilitas kredit
- 3). Kepastian tentang pendapatan yang diharapkan
- 4). Harapan tentang harga
- 5). Tersedianya beberapa alternatif bentuk kekayaan
- 6). Sistem atau cara pembayaran yang berlaku.

D. PENAWARAN UANG

Penawaran uang merupakan jumlah semua uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Penawaran uang meliputi:

- 1) Uang beredar secara sempit (*Narrow Money*)

Uang beredar secara sempit (M_1) adalah seluruh uang kartal (K) dan uang giral (G) yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat.

Persamaannya : $M_1 = K + G$

- 2) Uang beredar secara luas (*Broad Money*)

Uang beredar secara luas mencakup uang kartal, uang giral, serta deposito dan tabungan masyarakat di bank. Deposito dan tabungan disebut dengan istilah *quasi money*, yaitu sesuatu yang mendekati ciri dari uang.

Persamaannya : $M_2 = K + G + \text{Uang Kuasi}$

$$M_2 = M_1 + \text{Uang Kuasi}$$

- 3) Uang inti (*Reserve Money*)

Uang inti (H) dapat didefinisikan sebagai :

- a. saldo rekening koran atau giro milik bank-bank umum atau masyarakat pada Bank Indonesia (R).
- b. Uang tunai yang dipegang bank-bank umum dan masyarakat (K).

Persamaannya : $H = K + R$

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Uang

- 1) Tinggi rendahnya tingkat bunga
- 2) Tingkat pendapatan masyarakat
- 3) Jumlah penduduk
- 4) Keadaan letak geografis
- 5) Struktur ekonomi masyarakat
- 6) Penguasaan IPTEK penduduk
- 7) Globalisasi ekonomi



1.2 Perbankan

A. Bank Umum

Fungsi dan peran bank umum yang diuraikan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :

1) Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring).

2) Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3) Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4) Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5) Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat



menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6) Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu :

1) Pengalihan Aset (*asset transmutation*)

Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih aset yang likuid dari unit surplus (lender) kepada unit defisit (borrower).

2) Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3) Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

4) Efisiensi (*efficiency*)

Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah



insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

B. Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*. Bank sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Berikut ini perbedaan antara bank sentral dan bank umum:

Tabel 5.4. Perbedaan Bank Sentral dan Bank Umum

Pembeda	Bank Sentral	Bank Umum
Tujuan	Stabilitas rupiah	Profit orientation
Pengelola	Pemerintah	Swasta
Pengawasan	Pengawas	Diawasi oleh Bank Sentral
Kegiatan usaha	Mempengaruhi kegiatan bank umum	Dipengaruhi bank sentral
Penciptaan uang	Kartal dan giral	Giral
Pelayanan	Melayani jasa perbankan untuk bank	Melayani jasa perbankan untuk individu

Undang-undang yang mengatur tentang bank sentral adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia adalah lembaga yang independen baik dari segi kelembagaan, fungsi, manajemen, personalia pimpinan maupun anggaran. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen. Sebagai lembaga independen, BI memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah



Adapun tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Bank Indonesia memiliki tiga bidang tugas utama, yaitu:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
Pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Adapun teknik pengendalian moneter antara lain:
 - a. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - b. penetapan tingkat diskonto;
 - c. penetapan cadangan wajib minimum;
 - d. pengaturan kredit atau pembiayaan
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Ada dua kewenangan utama:
 - a. Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi
 - b. Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang
- 3) Mengatur dan mengawasi bank
 - a. Dalam hal ini Bank Indonesia berwenang untuk:
 - b. memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank
 - c. melaksanakan pengawasan bank
 - d. mengenakan sanksi terhadap bank (Psl. 24).
 - e. menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Psl. 25)

1.3 Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dengan menentukan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter.



Adapun tujuan dilaksanakannya kebijakan moneter antara lain:

- a. menjaga kestabilan ekonomi
- b. menjaga kestabilan harga
- c. meningkatkan kesempatan kerja
- d. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran

Ada dua macam kebijakan moneter, yaitu **kebijakan moneter ekspansif** dan **kebijakan moneter kontraktif**. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini ditempuh oleh bank sentral ketika perekonomian mengalami deflasi. Deflasi merupakan peristiwa ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya nilai tukar satuan moneter atas barang dan jasa. Hal ini terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih sedikit dari pada jumlah barang dan jasa, akibatnya harga barang cenderung menurun. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mengurangi jumlah uang beredar dan ditempuh oleh bank sentral ketika perekonomian mengalami inflasi. Inflasi merupakan peristiwa ekonomi yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar satuan moneter atas barang dan jasa. Hal ini terjadi ketika jumlah uang yang beredar lebih banyak dari pada jumlah barang dan jasa, akibatnya harga barang cenderung meningkat.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter dan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia berwenang:

- a. Menetapkan sasaran moneter dengan memerhatikan laju inflasi yang ditetapkan
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara: (1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valas, (2) menetapkan tingkat diskonto (suku bunga), (3) penetapan cadangan wajib minimum, dan (4) pengaturan kredit dan pembiayaan.

Instrumen Kebijakan Moneter

1) Operasi pasar terbuka

Kebijakan yang dijalankan bank sentral melalui memperjualbelikan surat berharga di pasar modal dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Dalam kondisi inflasi, bank sentral akan menjual surat berharga (SBI)

2) Tingkat diskonto

Bank sentral mempengaruhi jumlah uang beredar melalui tingkat suku bunga bank umum. Di Indonesia, kebijakan tingkat diskonto dikenal dengan istilah *BI rate*.



- 3) Penetapan cadangan wajib minimum
Penetapan cadangan wajib minimum adalah kebijakan moneter yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas wajib minimum bagi perbankan. Ketika cadangan kas wajib minimum dinaikkan maka kemampuan bank umum untuk mengalokasikan kredit akan berkurang, dan sebaliknya.
- 4) Pengaturan kredit dan pembiayaan
Pengaturan kredit dan pembiayaan dikenal dengan istilah kredit selektif. Dalam hal ini, setiap kredit yang disalurkan oleh bank umum ke masyarakat harus didasarkan pada 5C, yaitu *character*, *capability*, *collateral*, *capital*, dan *condition of economy*.

2. Lembar Pelatihan

- 1) Jelaskan perbedaan antara bank umum dan bank sentral!
- 2) Jika suatu negara mengalami resesi, kebijakan moneter apakah yang dapat ditempuh bank sentral untuk mengatasi resesi!
- 3) Jika bank X menerima tambahan deposit Rp500 jutadan menyalurkannya sebagai kredit pada nasabah A setelah dikurangi cadangan wajib minimum sebesar 10%. Hitunglah jumlah uang yang beredar di masyarakat!
- 4) Menurut teori kuantitas uang dari Irving Fisher, $MV = PT$ dalam kondisi ceteris paribus. Pada kondisi perekonomian yang bagaimanakah tingkat inflasi akan tinggi?



Kegiatan Pembelajaran 11

Ketenagakerjaan

1. Lembar Informasi

1.1 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

A. Klasifikasi Ketenagakerjaan

Pengklasifikasian ketenagakerjaan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain berdasarkan angkatan kerja dan latar belakang pendidikan dan pelatihan.

Ditinjau berdasarkan angkatan kerja, meliputi:

1) Golongan angkatan kerja

Angkatan kerja yang sedang bekerja baik diperusahaan perorangan, swasta maupun negara. Penduduk yang termasuk angkatan kerja tetapi belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Mereka yang termasuk golongan ini pada tahun 2004 berjumlah 9,86% dari keseluruhan angkatan kerja atau 10,3 juta.

2) Golongan bukan angkatan kerja, meliputi

- a) Golongan sekolah, kelompok ini termasuk usia kerja, tetapi belum bersedia bekerja yang mendatangkan penghasilan. Alasan ingin menuntut ilmu terlebih dahulu agar lebih berkualitas dalam memimpin perusahaan atau bekerja baik di BUMN maupun BUMS.
- b) Golongan ibu rumah tangga, wanita yang telah menikah banyak yang memilih untuk hanya menjadi ibu rumah tangga saja dan tidak membantu mencari nafkah untuk keluarga.
- c) Golongan pensiunan, mereka yang termasuk kelompok ini yaitu pensiunan PNS, purnawirawan, karyawan BUMN, karyawan BUMS. Pada umumnya mereka tidak melakukan kegiatan ekonomi kecuali menerima gaji pensiunan.

Ditinjau berdasarkan latar belakang pendidikan dan latihan, meliputi:

- 1). Tenaga kerja terdidik, mereka yang melakukan pekerjaan, kemampuannya diperoleh melalui pendidikan terlebih dahulu.



- 2). Tenaga kerja terlatih, mereka dapat bekerja setelah menjalankan latihan terlebih dahulu.
- 3). Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, klasifikasi seperti ini masih sering ditemui walaupun seiring jalan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin maju.

1.2 Pengangguran

Tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. Nanga (2005: 249) mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (BPS, 2001: 8).

Menurut Sukirno (2004: 28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Selanjutnya *International Labor Organization* (ILO) memberikan definisi pengangguran yaitu:

- a. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan.
- b. Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain/tambahan (BPS, 2001: 4).

Sedangkan menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menyatakan bahwa:

- a. Setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain.
- b. Setengah pengangguran sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain (BPS, 2000: 14).

Berdasarkan kepada faktor-faktor yang menimbulkannya, pengangguran dibedakan kepada tiga jenis, yaitu (Simanjuntak, 1998: 14):

- a. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi akibat kesenjangan waktu, informasi, maupun kondisi geografis antara pencari kerja dan lowongan kerja.



- b. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang ada.
- c. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Pengangguran berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian.

Untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran tersebut perlu diperhatikan dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pengangguran itu sendiri, yaitu (Bakir, 1984: 35):

- a. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).
- b. Waktu (banyak di antara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama).
- c. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

Berdasarkan dimensi di atas pengangguran dapat dibedakan atas (BPS, 2000: 8) yaitu:

- a. Pengangguran terbuka, baik terbuka maupun terpaksa. Secara sukarela, mereka tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan pengangguran terpaksa, mereka mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.
- b. Setengah pengangguran (*under unemployment*) yaitu mereka yang bekerja di mana waktu yang mereka pergunakan kurang dari yang biasa mereka kerjakan.
- c. Tampaknya mereka bekerja, tetapi tidak bekerja secara penuh. Mereka tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*) dan pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*)

2. Lembar Pelatihan

- 1) Ibu Amir adalah seorang ibu rumah tangga. Namun sejak tahun 2011, ketika sang suami mengalami PHK, Ibu Amir bekerja sebagai buruh cuci. Jika ditinjau berdasarkan angkatan kerja, maka Ibu Amir termasuk dalam golongan apa? Jelaskan jawaban Anda!
- 2) Rudi adalah seorang sarjana teknik kimia. Saat ini Rudi bekerja di Bank BNI sebagai *teller*. Menurut Anda, apakah Rudi termasuk sebagai pekerja atau pengangguran? Jelaskan jawaban Anda!
- 3) Berikan contoh pengangguran tersembunyi!



Kegiatan Pembelajaran 12

Pembangunan Ekonomi

2. Lembar Informasi

1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi digambarkan sebagai sebuah proses bertambahnya pendapatan per kapita dalam jangka panjang yang disertai dengan adanya perubahan-perubahan struktur perekonomian dalam rangka meningkatkan *output*. Proses yang terjadi dalam pembangunan ekonomi dapat meliputi perubahan dalam komposisi produksi, pola penggunaan sumber daya, pola distribusi pendapatan, penciptaan kesempatan kerja dan sistem kelembagaan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pada hal pembangunan tidak hanya difokuskan mengejar kemajuan lahiriyah atau kepuasan batiniah, melainkan juga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pembangunan itu merata diseluru tanah air, bahwa bukan hanya satu golongan atau sebagian golongan tetapi seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan social, yang menjadi tjuan dan cita-cita kemerdekaan kita. Karena itu yang menjadi tujuan jangka panjang, tujuan akhir dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan kedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang (25 tahun) adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan titik berat Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaranutama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri , serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedang



pembangunan dibidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Adapun tujuan pembangunan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

1.2 Pertumbuhan Ekonomi

A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pengertian pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktifitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan pendapatan masyarakat selaku pemilik faktor produksi juga akan mengalami peningkatan.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat tahun sebelumnya. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri akan dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institutional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi di suatu negara yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, tetapi tidak cukup itu saja, masih dibutuhkan faktor-faktor lain. Untuk mewujudkan potensi yang terkandung di dalam teknologi, maka perlu



diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi. (Michael P Todaro,2000:144).

B. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDB tanpa melihat apakah pertumbuhan PDB tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pada pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

C. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal.

Menurut teori ini pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*) akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marjinal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marjinal. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai kondisi yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal, maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.

2) Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar adalah perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan oleh teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peranan investasi (**I**) dalam jangka



panjang. Harrod – Domar melihat pengaruh investasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi (I) tidak hanya mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat (Z), tetapi juga terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang ini, I menambah stok kapital. Jadi $I = \Delta K$, dimana K adalah stok kapital dalam masyarakat. Ini berarti pula peningkatan kapasitas produksi masyarakat.

3) Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Robert Solow dan Trevor Swan mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sering disebut model pertumbuhan neo-klasik. Model Solow-Swan memusatkan perhatiannya kepada bagaimana pertumbuhan penduduk, kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ada 4 anggapan yang melandasi model neo-klasik :

- a. Tenaga kerja (L), tumbuh dengan laju tertentu, misalnya p per tahun
- b. Adanya fungsi produksi $Q = F(K, L)$ yang berlaku bagi setiap periode.
- c. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat.
- d. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan $S = I = \Delta K$

4) Teori Pertumbuhan Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dan pelakunya adalah para inovator. Menurut Schumpeter, yang lebih menarik dan lebih penting adalah kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta.

Inovasi mempunyai tiga pengaruh, yang pertama adalah diperkenalkannya teknologi baru, yang kedua, inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Yang ketiga, inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses imitasi.

Menurut Schumpeter ada lima (5) macam kegiatan yang termasuk sebagai inovasi, yaitu:

- a. Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada.
- b. Diperkenalkannya cara berproduksi baru.



- c. Pembukaan daerah-daerah pasar baru.
- d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
- e. Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi industri.

2. Lembar Pelatihan

- 1) Jelaskan perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi!
- 2) Menurut Anda, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara? Jelaskan!
- 3) Diketahui PDB Indonesia tahun 2010 sebesar Rp527 triliun dan PDB tahun 2011 sebesar Rp539 triliun. Hitunglah pertumbuhan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2010-2011!



Kegiatan Pembelajaran 13

APBN dan APBD

1. Lembar Informasi

1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

A. Pengertian APBN

Kata "anggaran" secara etimologi berasal dari kata "anggar" atau "kira" atau "perhitungan", sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berarti perkiraan atau perhitungan jumlah pendapatan dan pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara.

Anggaran dalam bahasa Inggris disebut *budget* yang berasal dari bahasa Prancis *bouge* atau *bougette* yang berarti "tas"; di Inggris berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas kulit tersebut dipergunakan oleh menteri keuangan untuk menyimpan surat-surat anggaran.

Pengertian anggaran (*budget*) secara umum ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu satu tahun. Anggaran penerimaan dan pengeluaran negara kita dikenal dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun.

Periode APBN di Indonesia sejak tahun 1969 dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kemudian sejak adanya reformasi di Indonesia, pada tahun 2000 periode APBN dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dari tahun yang bersangkutan.

Tujuan APBN tercantum dalam UUD 1945 sesudah amendemen Pasal 23 Ayat (1) menyatakan "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

APBN disusun setiap tahun berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan APBN dituangkan dalam Program Pembangunan Lima Tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang



ditetapkan presiden bersama DPR. Dalam hal ini REPETA memuat keseluruhan kebijakan publik termasuk kebijakan publik yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut ditetapkan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah.

B. Fungsi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)

1) Fungsi Alokasi

Kehidupan berbangsa dan bernegara menyangkut beberapa bidang, antara lain: ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Masing-masing bidang tersebut agar dapat berjalan lancar dibutuhkan danayang memadai. APBN memuat pengalokasian dana dari seluruh pendapatan negara kepada pos-pos pembelanjaan baik untuk pembiayaan pembangunan maupun yang lain-lainnya, sehingga penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lancar dan terkendali. Sebagai contoh, anggaran untuk membayar utang luar negeri, biaya pendidikan, memajukan pertanian, kesehatan, dan sarana-sarana lainnya. Alokasi dana APBN tersebut akan memengaruhi sendi-sendi perekonomian dan ketersediaan lapangan kerja.

2) Fungsi Distribusi

Penerimaan Negara dalam APBN selain digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa, dan dana pensiun.

Subsidi, beasiswa, dan dana pension merupakan bentuk dari *transfer payment*. *Transfer payment* adalah pengalihan pembiayaan dari satu sector ke sector yang lain. Misalnya, subsidi harga pupuk ditujukan untuk meningkatkan pendapatan para petani. Harga pupuk urea yang sebenarnya adalah Rp2.000,00 per kg. Pemerintah memberi subsidi sebesar Rp1.000,00 per kg. Dengan adanya subsidi tersebut, petani dapat membelinya dengan harga lebih murah yaitu Rp1.000,00 per kg. Dana untuk subsidi tersebut berasal dari APBN. Subsidi pupuk ini mengurangi biaya produksi yang harus dikeluarkan petani. Dengan demikian, petani dapat menikmati uang negara yang telah dianggarkan dalam APBN.

3) Fungsi Stabilitas

APBN merupakan salah satu instrumen bagi pengendalian



stabilitas perekonomian negara di bidang fiskal. Misalnya, dalam kondisi inflasi, pemerintah mengambil kebijakan anggaran surplus. Apa yang terjadi apabila pemerintah menjalankan kebijakan ini? Kebijakan anggaran surplus berarti pos penerimaan lebih besar daripada pos pengeluaran. Dalam kebijakan ini, pemerintah menaikkan penerimaan pajak, yang mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga mengurangi tingkat konsumsi. Hal ini untuk mencegah semakin meningkatnya peredaran uang dalam masyarakat.

Pos-pos penerimaan dalam APBN sebagai pedoman dalam usaha memperoleh pendapatan baik dari segi macam penerimaan maupun jumlah uangnya, harus dapat direalisasikan agar dapat menutup pos-pos pengeluaran. Demikian pula pos-pos pembelanjaan atau pengeluaran dalam APBN harus dilaksanakan dengan disiplin agar terjadi keteraturan dan berdampak positif bagi perekonomian dan pembelanjaan negara.

C. Penyusunan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggung jawaban APBN

Penyusunan APBN berdasarkan pada tiga asas, yaitu kemandirian, penghematan, dan prioritas.

- a. Kemandirian, artinya pembelanjaan oleh Negara bertumpu pada kemampuan negara; apabila penerimaan dalam negeri meningkat maka pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap.
- b. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- c. Penajaman prioritas pembangunan, artinya pembelanjaan dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat.

Penyusunan APBN diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) berbunyi "Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah". Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disusun oleh departemen atau lembaga negara dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk membiayai kegiatan pembangunan.

RAPBN yang telah disusun oleh pemerintah tersebut kemudian diajukan oleh presiden kepada DPR, selanjutnya DPR membahas RAPBN tersebut dalam masa sidang untuk diterima atau ditolak. Apabila RAPBN



tersebut disetujui oleh DPR kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, tetapi apabila RAPBN tersebut tidak mendapatkan persetujuan DPR maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 Ayat (3) yang berbunyi “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, maka pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Dalam melaksanakan pengeluaran anggaran rutin diperlukan DIK (Daftar isian Kegiatan) dan DIP (Daftar Isian Proyek) untuk pengeluaran anggaran pembangunan. Pembayaran DIK dan DIP dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dalam bentuk SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang dapat ditukarkan dengan uang tunai.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN terdiri atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh aparat pemerintah berikut ini:

- a. Atasan dari kepala kantor/satuan kerja bagi anggaran rutin, dan atasan dari pimpinan proyek.
- b. Atasan langsung bendaharawan
- c. Direktur Jenderal dan Pejabat yang setingkat pada Departemen/Departemen/Lembaga terhadap pelaksanaan PO (Petunjuk Operasional) dalam rangka pelaksanaan DIP pada proyek.
- d. Biro Keuangan Departemen/Lembaga dan Biro Keuangan
- e. Sekretaris Jenderal Departemen/Lembaga
- f. Inspektur Jenderal Departemen/Unit Pengawasan pada lembaga
- g. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara
- h. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Pengawasan Eksternal adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan instansi pengawasan tertinggi dari pelaksanaan APBN. BPK adalah suatu badan atau lembaga tinggi negara lainnya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan. (Lihat UUD 1945 sesudah amandemen Pasal 23E).

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan APBN disebut PAN (Perhitungan Anggaran Negara). PAN ini terlebih dahulu diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). PAN juga merupakan pengecekan terhadap anggaran belanja yang telah direncanakan dan realisasinya, serta seberapa jauh realisasi penerimaan



yang dianggarkan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap PAN diberitahukan kepada DPR dalam bentuk buku "Hasil Pemeriksaan Tahunan" (buku HAPTAH). DPR melalui komisi APBN kemudian meneliti pertanggungjawaban APBN dan memberikan pendapat mengenai hasil pemeriksaan BPK tersebut. Bentuk persetujuan DPR terhadap PAN ditetapkan dalam bentuk undang-undang.

D. Sumber-Sumber Pendapatan Negara dan Jenis-jenis Pembelanjaan Negara

Sumber pendapatan negara dapat berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Sumber penerimaan perpajakan terbagi menjadi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Adapun yang termasuk dalam sumber penerimaan pajak dalam negeri antara lain Pajak Penghasilan migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Pajak lainnya. Sedangkan Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas: Bea masuk dan Pajak/Pungutan ekspor.

Adapun yang termasuk dalam penerimaan bukan pajak yaitu Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan sumber daya alam terdiri atas minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Berikut ini adalah APBN Indonesia Tahun 2012 (*dalam triliun*):

Pendapatan Negara	1.311,4
Pendapatan Perpajakan	1.032,6
Pendapatan Bukan Perpajakan	270
Hibah	0,8
Belanja Negara	1.435,4
Belanja Pemerintah Pusat	965,0
Transfer ke Daerah	470,4
Pembiayaan	124,0
Dalam Negeri	125,9
Luar Negeri	(1,9)

* Sumber Kementerian Keuangan



Jenis-jenis pembelanjaan negara terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri dan utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat.

Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan daerah. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Jika ditinjau menurut sifatnya, belanja atau pengeluaran tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Belanja yang bersifat ekskausif, yaitu belanja untuk membeli barang atau jasa yang langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain. Misalnya, penyediaan vaksin untuk imunisasi (langsung dikonsumsi), pembelian pesawat atau kapal terbang (dapat menghasilkan pendapatan untuk memperoleh barang lain).
- 2) Belanja yang bersifat transfer, yaitu belanja untuk kegiatan-kegiatan sosial yang tidak produktif. Misalnya, sumbangan untuk korban bencana alam, subsidi, beasiswa, dan lain-lain.

1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

A. Pengertian APBD

APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah sebagai berikut:

- a. UU No.32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
- b. UU No.33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara



Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD

Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara Negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari.

B. Fungsi APBD

1) Fungsi Otorisasi

APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun.

2) Fungsi Perencanaan

APBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK, dan instansi pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

4) Fungsi Alokasi

Dalam APBD telah digambarkan dengan jelas sumber-sumber pendapatan dan alokasi pembelanjanya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

5) Fungsi Distribusi

Sumber-sumber pendapatan dalam APBD digunakan untuk pembelanjaan-pembelanjaan yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan.

C. Penyusunan APBD

APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- b. Pemerintah Daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pembahasan ini pihak Pemerintah Daerah (Eksekutif) dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif yang beranggotakan Sekretaris Daerah, BAPPEDA, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu, sedangkan DPRD dilakukan oleh Panitia Anggaran yang anggotanya terdiri atas tiap fraksi-fraksi



- c. RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah untuk dilaksanakan

D. Pelaksanaan, Pengawasan, Dan Pertanggungjawaban APBD

APBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaan APBD semua pengeluaran harus didasarkan pada Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA), Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

Pengawasan pelaksanaan APBD secara prinsip sama dengan APBN, yaitu terdapat pelaksanaan secara eksternal dan internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK; sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya.

Setiap tahun anggaran berakhir, pemerintah daerah bertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRD, di samping itu ada pula laporan pelaksanaan APBD triwulan yang disampaikan tiap tiga bulan.

E. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

- a. Pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan-penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah, seperti: pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah, dan lain-lain.
- b. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk daerah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus.
 - 1) Dana bagi hasil, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah oleh negara.
 - 2) Dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah.
 - 3) Dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional.
- c. Pinjaman daerah.



d. Penerimaan lain-lain yang sah.

F. Jenis-jenis Pembelanjaan Daerah

Adanya otonomi daerah (sistem desentralisasi) maka jenis-jenis pembelanjaan tiap-tiap daerah akan berbeda-beda yang diwarnai dan disesuaikan dengan kondisi dan keunikan yang dimiliki oleh setiap daerah. Secara umum jenis-jenis pembelanjaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja rutin, yaitu pengeluaran yang secara rutin dibelanjakan oleh pemerintah daerah, antara lain, untuk:
 1. belanjagaji,
 2. belanjabarang,
 3. belanjapemeliharaan,dan
 4. belanjaperjalanandinas.
- b. Belanja pembangunan, yaitu semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pembangunan di daerah, yang meliputi pelaksanaan proyek fisik dan non fisik.

1.3. Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

A. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak langsung yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

B. Subyek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subyek Pajak adalah :

- 1). a. Orang Pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- 2). Badan
- 3). Bentuk Usaha Tetap

Subyek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1). Subyek Pajak dalam negeri

- a. Subyek Pajak orang pribadi, yaitu :
 - (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak



harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

- (2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2). Subyek pajak luar negeri

- a. Subyek pajak orang pribadi, yaitu :

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang :

- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Subyek pajak badan, yaitu :

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang :

- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan:

- 1). Badan perwakilan Negara asing
- 2). Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3). Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut



- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberi pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4). Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

C. Obyek Pajak Penghasilan

Yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- 1). Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- 2). Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3). Laba usaha
- 4). Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.



- 5). Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- 6). Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 7). Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 8). Royalti
- 9). Sewa dan penghasialn lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 10). Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 11). Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan peraturan pemerintah
- 12). Keuntungan karena selisih kurs mata uang
- 13). Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- 14). Premi asuransi
- 15). Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- 16). Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Pengecualian Obyek Pajak Penghasilan

- 1) a. Bantuan atau sumbangan
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- 2) Warisan
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dari wajib pajak atau pemerintah
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa.
- 6) Dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia



- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- 8) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi
- 9) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana
- 10) Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

D. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Penghasilan kena pajak diperoleh dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan.

Biaya yang Boleh Dikurangkan dan Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak

1). Biaya yang boleh dikurangkan

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
- c. Iuran kepada dana pensiun
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing



- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

2). Biaya yang tidak boleh dikurangkan

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan dana cadangan
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi
- e. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikn dalam bentuk natura dan kenikmatan
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

E. Pemotong PPh Pasal 21 dan Pasal 26

- 1). Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
- 2). Bendaharawan pemerintah termasuk bendahaarwan pada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarka gaji,



- upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3). Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atas Jaminan Hari Tua.
 - 4). Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - 5). Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri
 - 6). Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
 - 7). Perusahaan, badan, dan BUT, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
 - 8). Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

- 1). Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh wajib pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, komisi, gaji istimewa, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri dan/atau tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan berupa pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;



- 2). Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya termasuk tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenisnya lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- 3). Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- 4). Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (JHT), dan pembayaran lain yang sejenis;
- 5). Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, penterjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - j. Peserta perlombaan;
 - k. Petugas penjaja barang dagangan;
 - l. Petugas dinas luar asuransi;
 - m. Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
 - n. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- 6). Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat Negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya;



- 7). Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit).

Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

- 1). Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- 2). Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
- 3). Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4). Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan pemerintah.
- 5). Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- 6). Pembayaran THT-Taspendan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
- 7). Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

F. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan tambahan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung atau menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah :

- a. Rp15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak.
- b. Rp1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang diberikan apabila ada penghasilan isteri yang digabungkan dengan penghasilan suami, dalam hal isteri:
 - (1) Bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha / pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.



- (2) Bekerja sebagai karyawan pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas.
- (3) Bekerja sebagai karyawan pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
- d. Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
- e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

G. Cara Menghitung PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

Contoh :

- Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto Tahun Pajak 2009 sebesar Rp 96.800.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut:

Penghasilan Neto 1 tahun	Rp96.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	
a. Diri sendiri	Rp 15.840.000
b. Status menikah	Rp 1.320.000
c. Anak (3 x Rp 1.320.000)	<u>Rp 3.960.000</u>
	<u>Rp21.120.000,00-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp75.680.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang :	
5% x Rp50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp25.680.000,00	<u>Rp 3.852.000,00 -</u>
PPh pasal 21 terutang (setahun)	Rp 6.352.000,00
- Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya



pada awal Oktober 2009 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha mulai Oktober s.d. Desember 2009 sebesar Rp4.710.715,00.

Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut:

Penghasilan 3 bulan	Rp 4.710.715,00
Penghasilan 1 tahun:	
$\frac{12}{3} \times \text{Rp } 4.710.715,00$	Rp 18.842.860,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 15.840.000,00 –</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 3.002.860,00
Dibulatkan menjadi (untuk penerapan tarif)	Rp 3.002.000,00
Pajak penghasilan yang terutang 1 tahun	
$5\% \times \text{Rp } 3.002.000,00 = \text{Rp } 150.100,00$	
Pajak Penghasilan yang terutang tahun 2009 (3 bulan)	
$\frac{3}{12} \times \text{Rp } 150.100,00 = \text{Rp } 37.525,00$	

3. Seorang Wajib Pajak (suami) dalam tahun 2009 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin pisah harta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 109.192.000,00.

Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto suami	Rp 219.608.000,00
Penghasilan Neto isteri	<u>Rp 109.192.000,00 +</u>
Penghasilan Neto gabungan	Rp 328.800.000,00
PTKP (K/I/3)	<u>Rp 36.960.000,00 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 291.840.000,00

PPh terutang gabungan (suami dan isteri) :

$5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00$	Rp 2.500.000,00
$15\% \times \text{Rp } 200.000.000,00$	Rp 30.000.000,00
$25\% \times \text{Rp } 41.840.000,00$	<u>Rp 10.460.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 42.960.000,00

- a. PPh terutang untuk suami:

$$\frac{\text{Rp } 219.608.000,00}{\text{Rp } 28.693.308,00} \times \text{Rp } 42.960.000,00 = \text{Rp } 328.800.000,00$$

- b. PPh terutang untuk SPT isteri:

$$\frac{\text{Rp } 109.192.000,00}{\text{Rp } 14.266.692,00} \times \text{Rp } 42.960.000,00 = \text{Rp } 328.800.000,00$$

4. Dalam hal suami – isteri telah hidup berpisah, penghitungan Penghasilan Kena Pajak-nya dilakukan sendiri-sendiri (menggunakan 2 (dua) SPT Tahunan PPh WP OP yang berbeda).



PTKP bagi suami dan isteri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut :

Seorang Wajib Pajak (suami) dalam tahun 2009 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus hidup berpisah (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 109.192.000,00.

a. Perhitungan PPh terutang bagi suami:

Penghasilan Neto suami	Rp 219.608.000,00
PTKP (TK/3)	<u>Rp 19.800.000,00 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 199.808.000,00
PPh terutang suami:	
5 % x Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 149.808.000,00	<u>Rp 22.471.200,00 +</u>
Jumlah	Rp 24.971.200,00

b. Perhitungan PPh terutang bagi isteri:

Penghasilan Neto isteri	Rp 109.192.000,00
PTKP (TK)	<u>Rp 15.840.000,00 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 93.352.000,00
PPh terutang isteri :	
5% x Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 43.352.000,00	<u>Rp 6.502.800,00 +</u>
Jumlah	Rp 9.002.800,00

1.4. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar hukum pungutan pajak bumi dan bangunan adalah UU No. 12 th 1985, UU No. 12 Tahun 1994 dan beberapa peraturan terkait. Adapun yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan bangunan, meliputi: (1) bumi – permukaan bumi/tanah; (2) bangunan (konstruksi teknik yang dilekatkan secara tetap pada bumi, dan juga (3) termasuk bangunan seperti jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, dan tempat penampungan minyak.

Adapun tanah dan bangunan yang dikecualikan dalam perhitungan PBB adalah tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk: (1) kepentingan umum; (2) pemakaman dan peninggalan purbakala; (3) dipergunakan perwakilan Diplomatik; dan (4) hutan lindung, suaka alam taman nasional, tanah yg dikuasai desa. Sedangkan pihak yang termasuk dalam penanggung PBB adalah



pihak yang (1) mempunyai hak; (2) memperoleh manfaat; dan (3) memiliki/menguasai orang yang tersebut diatas merupakan subyek PBB.

Pendekatan Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

1). Penilaian Massal

- a. NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).
- b. NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
- c. Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan komputer (*Computer Assisted Valuation/CAV*)

2). Penilaian Individual

- a. Objek pajak bumi yang nilainya di atas Rp 3.200.000 meter persegi.
- b. Objek pajak bangunan yang nilainya di atas Rp 1.366.000 meter persegi.
- c. Objek pajak yang nilai jualnya Rp 500.000.000 atau lebih.
- d. Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lapangan golf, objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

3). Pendekatan Data Pasar

- a. Pendekatan Data Pasar adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara membandingkan antara objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.
- b. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga digunakan untuk menentukan NJOP bangunan

4). Pendekatan Biaya

- a. Pendekatan Biaya adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutannya.
- b. Umumnya, pendekatan biaya digunakan untuk menentukan NJOP bangunan

5). Pendekatan Pendapatan

- a. Pendekatan Pendapatan adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara mengkapitalisasikan pendapatan satu tahun dari objek pajak yang bersangkutan.
- b. Biasanya, pendekatan pendapatan diterapkan untuk objek pajak yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan, seperti hotel, gedung perkantoran yang disewakan, dsb.
- c. Pendekatan ini juga digunakan sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan pendekatan lainnya.



Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

- 1). Dasar perhitungan : NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)
- 2). Tarif : 0,5 %
- 3). Rumus : tarif pajak x NJKP
- 4). Besarnya persentase NJKP :
 - a. Sebesar 40% dari NJOP untuk
 - perkebunan dan kehutanan
 - objek pajak lainnya, jika nilainya lebih besar dari 1M
 - b. Sebesar 20% dari NJOP untuk
 - Objek pajak pertambangan
 - Objek pajak lainnya jika nilainya kurang dari 1M
- 5). Cara menghitung PBB:

$$\text{PBB} = 0.5\% \times \text{NJKP}$$

$$= 0,5 \% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]$$
- 6). NJOPTKP ditetapkan paling tinggi Rp 12.000.000,-
- 7). Apabila Objek Pajak lebih dari 1 NJOP maka pilih yg terbesar untuk dikurangi NJOPTKP sebesar Rp 12.000.000,- sedangkan Objek Pajak yg lainnya dikenakan penuh tanpa dikurangi NJOPTKP

Tahun Pajak dan Penagihan

- a. Tahun takwin obyek pada tgl. 1 Januari
- b. Tempat terutang - dimana obyek berada
- c. Dasar penagihan : SPPT , SKP , STP
- d. SPPT – bila tidak tunggakan
- e. SKP – Besar pjk + denda Administrasi, Bila tidak meng SPOP pokok + 25 %
Keterangan lain : Sel SPOP dg hsl. Pemerak + 25 %
- f. STP – pokok + bunga 2 % pbl max 24 bln

Contoh Perhitungan PBB

1. Tuan Andi mempunyai tanah dan bangunan di Malang dgn luas 300 m² dan 250 m² masing2 dgn harga Rp 400.000,- dan Rp 250.000,- Hitunglah berapa PB yg dibayar Tuan Andi?

Jawab

NJOP Tanah = 300 m ² x Rp 400.000,-	=Rp 120.000.000,-
NJOP Bangunan = 250 m ² x Rp 250.000,-	= Rp 62.500.000,-
NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB	= Rp 182.500.000,-
NJOPTKP	= Rp 12.000.000,-
NJKP	Rp 170.500.000,-
PBB = 0,5% x 20% x (Rp 170.500.000,-)	
	= Rp 170.500,-



2. Tuan Firman mempunyai 2 rumah, satu di Sidoarjo dan satu di Mojokerto dgn rincian sbb:

❖ Sidoarjo

Luas Tanah = 300 m^2 ; NJOP = Rp 450.000,-

Luas Bangunan = 230 m^2 ; NJOP = Rp 350.000,-

❖ Mojokerto

Luas Tanah = 320 m^2 ; NJOP = Rp 340.000,-

Luas Bangunan = 260 m^2 ; NJOP = Rp 325.000,-

Hitunglah PBB yg dibayar Tuan Firman?

Jawab:

Sidoarjo

NJOP Tanah = $300 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 450.000,-$	= Rp 135.00.000,-
NJOP Bangunan = $230 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 350.000,-$	= <u>Rp 80.500.000,-</u>
NJOP Dasar Pengenaan PBB	= Rp 215.500.000,-
NJOPTKP	= <u>Rp 12.000.000,-</u>
NJKP	= Rp 203.500.000,-

Mojokerto

NJOP Tanah = $320 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 340.000,-$	= Rp 108.000.000,-
NJOP Bangunan = $260 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 325.000,-$	= <u>Rp 84.500.000,-</u>
NJOP Dasar Pengenaan PBB	= Rp 192.500.000,-
NJOPTKP	= <u>0</u>
NJKP	= Rp 192.500.000,-
PBB = $0,5\% \times 20\% \times (203.500.000 + 192.500.000)$	
	= Rp 396.000,-

3. PT Marina Residence menyewakan apartemen dengan spesifikasi
- Luas tanah = 600 m^2 ; $\text{NJOP}_T = \text{Rp } 2.000.000,- / \text{m}^2$
 - Bangunan Hunian → 20 unit @ 20 m^2 ; NJOP = Rp 1.000.000,- / m^2
10 unit @ 10 m^2 ; NJOP = Rp 500.000,- / m^2
 - Bangunan Sarana → Lift = 50 m^2 ; NJOP = Rp 500.000,- / m^2
 - Kolam Renang: 100 m^2 ; NJOP = Rp 250.000,- / m^2
 - Besarnya NJOPTKP adalah Rp 12.000.000,-
- Hitunglah : PBB untuk type 20 dan type 10 per unit

Jawab:

1. Cari Total NJOP PBB

a. NJOP Bumi = $600 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 1.200.000.000,-$

b. NJOP Bangunan

➤ Hunian :

Type 20 = $20 \text{ unit} \times 20 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 400.000.000,-$



$$\text{Type 10} = 10 \text{ unit} \times 10 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 500.000,- = \text{Rp } 50.000.000,-$$

➤ Sarana:

$$\text{Lift} = 50 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 500.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$$

$$\text{Kolam Renang} = 100 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 250.000,- = 25.000.000,-$$

$$\begin{aligned} \text{NJOP Bangunan} &= \text{Hunian} + \text{sarana} \\ &= \text{Rp } 500.000.000,- \end{aligned}$$

2. Total Luas Bangunan Hunian
(20 m² x 20 unit) + (10 m² x 10 unit) = 500 m²
3. PBB terutang type 20 per unit

$$\text{NJOP Bumi} = \frac{20\text{m}^2}{500\text{m}^2} \times \text{Rp } 1.200.000.000,- = \text{Rp } 48.000.000,-$$

$$\text{NJOP Bangunan} = \frac{20\text{m}^2}{500\text{m}^2} \times \text{Rp } 500.000.000,- = \underline{\text{Rp } 20.000.000,-}$$

$$\text{NJOP}_{T+B} = \text{Rp } 68.000.000,-$$

$$\text{NJOPTKP} = \underline{(\text{Rp } 12.000.000,-)}$$

$$\text{NJKP} = \text{Rp } 56.000.000,-$$

$$\text{PBB} = 0,5\% \times 20\% \times \text{Rp } 56.000.000,- = \mathbf{\text{Rp } 56.000,-}$$

4. PBB terutang type 10 per unit

$$\text{NJOP Bumi} = \frac{10\text{m}^2}{500\text{m}^2} \times \text{Rp } 1.200.000.000,- = \text{Rp } 24.000.000,-$$

$$\text{NJOP Bangunan} = \frac{10\text{m}^2}{500\text{m}^2} \times \text{Rp } 500.000.000,- = \underline{\text{Rp } 10.000.000,-}$$

$$\text{NJOP}_{T+B} = \text{Rp } 34.000.000,-$$

$$\text{NJOPTKP} = \underline{(\text{Rp } 12.000.000,-)}$$

$$\text{NJKP} = \text{Rp } 22.000.000,-$$

$$\text{PBB} = 0,5\% \times 20\% \times \text{Rp } 22.000.000,- = \text{Rp } 22.000$$

1.5. Kebijakan Fiskal Pemerintah

• Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan kita kenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal.

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap, artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti, dan terjaganya (kestabilan) harga-harga umum. Berikut ini merupakan tujuan kebijakan fiskal:



1) Mencegah Pengangguran

Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan yang paling utama dari kebijakan fiskal. Mengapa? Karena suatu perekonomian dapat mencapai laju pertumbuhan yang dikehendaki melalui tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*fullemployment*).

Fullemployment dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan seluruh angkatan kerja mendapat pekerjaan. Kondisi ini dapat terwujud bila pemerintah mampu menambah lapangan kerja sehingga dapat menampung seluruh tenaga kerja. Kebijakan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini, antara lain, dengan mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dari dalam negeri, pemerintah menambah pengeluaran untuk membuka lapangan kerja padat karya melalui proyek-proyek pembangunan fisik.

2) Stabilitas Harga

Penurunan yang tajam dari dalam harga-harga umum (*deflasi*) jelas akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapat keuntungan. Demikian pula sebaliknya, harga-harga umum yang meningkat terus (*inflasi*) juga mempunyai akibat yang tidak baik bagi perekonomian. Karena penghasilan yang diterima oleh masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harganya terus naik.

Inflasi yang berkepanjangan akan melemahkan perekonomian karena para pemilik modal akan beralih dari investasi produktif ke investasi dalam bentuk barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan gedung karena hal ini lebih menguntungkan daripada investasi produktif.

Untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi, kebijakan fiskal dilaksanakan melalui kebijakan berikut ini:

a) Mengubah Pengeluaran Pemerintah

Dalam kondisi inflasi, uang yang beredar melebihi dari yang diperlukan dalam perekonomian. Untuk itu pemerintah mengurangi pengeluaran sehingga mengakibatkan tabungan (pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran).

b) Mengubah Tingkat Pajak

Menaikkan tarif pajak pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi masyarakat.

c) Pinjaman Paksa

Pemerintah memotong gaji pegawai negeri sebagai pinjaman pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.



- **Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal**

Bila ditinjau dari macamnya, kebijakan fiskal ada empat macam, yaitu:

- 1) **Kebijakan Anggaran Pembiayaan Fungsional (*Functional Finance*)**

Dalam hal ini pengeluaran dan penerimaan pemerintah di tentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja (*employment*). Misalnya kebijakan perpajakan. Di satu pihak pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah, di lain pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta maupun individu. Sehingga dalam kondisi banyaknya pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Melainkan melakukan pinjaman yang dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat.

- 2) **Kebijakan Pengelolaan Anggaran (*The Managed Budget Approach*)**

Pada pendekatan ini pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman senantiasa dihubungkan. Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Kebijakan anggaran defisit adalah pengaturan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara.

Kebijakan ini biasa diterapkan dalam keadaan deflasi, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan jumlah barang-barang dan jasa berkembang lebih cepat daripada perkembangan jumlah uang. Dalam keadaan deflasi harga-harga menjadi turun, perdagangan menjadi lesu, akibatnya uang sukar diperoleh, daya beli masyarakat berkurang, produksi menurun, dan pengangguran meluas. Sedangkan kebijakan anggaran surplus adalah pengaturan pengeluaran negara lebih kecil daripada penerimaan. Kebijakan ini biasa diterapkan dalam keadaan inflasi, yaitu suatu keadaan jumlah uang yang beredar berkembang lebih cepat daripada perkembangan jumlah barang dan jasa. Dalam kondisi inflasi ini harga-harga naik secara menyeluruh akibatnya nilai uang menjadi turun, upah riil menurun.

- 3) **Kebijakan Stabilitas Anggaran Otomatis (*The Stabilizing Budget*)**

Dengan kebijakan stabilitas anggaran otomatis, pengeluaran



pemerintahakan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relative dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh.

Apabila terjadi deflasi, program pengeluaran pemerintah tidak akan diubah, namun penerimaan dari pajak akan diturunkan terutama dari pajak pendapatan. Oleh karena itu, akan terjadi keadaan pengeluaran lebih besar daripada penerimaan (defisit dalam anggaran belanja) dan hal ini akan mendorong perkembangan sektor swasta kembali bergairah sampai tercapainya kesempatan kerja penuh. Sebaliknya, dalam masa inflasi ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan dan tidak perlu banyak tunjangan pengangguran, sehingga akan ada surplus anggaran belanja.

4) Kebijakan Anggaran Belanja Berimbang (*Balanced Budget Approach*)

Kebijakan anggaran belanja seimbang adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Dapat pula ditempuh melalui pendekatan dengan mempertahankan keseimbangan anggaran. Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan, diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar utang negara.

2. Lembar Pelatihan

- 1) Jelaskan perbedaan antara APBN dan APBD
- 2) Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM. Dampak kebijakan tersebut adalah kenaikan harga beberapa komoditas barang yang pada akhirnya mengurangi daya beli masyarakat.

Menurut Anda, diantara kebijakan fiskal manakah yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan menurunnya daya beli masyarakat? Jelaskan jawaban Anda!